

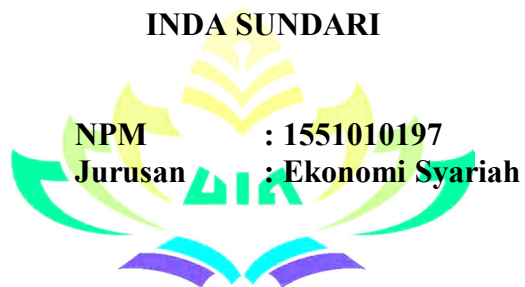
**PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT), INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN UPAH MINIMUM (UM)
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JPM)
KABUPATEN/KOTADI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(TAHUN 2011-2017)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi**

Oleh:

INDA SUNDARI



Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Gustika Nurmalia, SEL., M.E.I



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Kemiskinan Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga tertinggi sejak tahun 2011 - 2015 dibandingkan Provinsi lain se-Sumatera yaitu dengan rata-rata 14,90 persen dibawah Provinsi Aceh 18,34 persen dan provinsi Bengkulu 17,49 persen. Dilihat dari keadaan geografis Provinsi Lampung yang merupakan gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Sumatera yang memiliki potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional yang ditunjang dengan SDA yang dimiliki Provinsi Lampung. Seharusnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan di Provinsi Lampung sehingga dapat menekan angka kemiskinan. Tetapi realita yang terjadi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung tahun 2011 – 2017 secara parsial?, bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung tahun 2011 – 2017 secara simultan?, serta bagaimana penanggulan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung tahun 2011 – 2017 baik secara parsial maupun secara simultan, serta bagaimana penanggulan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian dokumentasi atau studi pustaka (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan panel data dengan pendekatan model efek tetap (*Random effect model*), Langkah-langkah penelitian ini yaitu observasi, pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik seta analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *Random Effect Model* diperoleh hasil bahwa masing-masing variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011- 2017. Secara simultan Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017. Tiga penanggulan kemiskinan dalam perspektif Islam yaitu: pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui padat karya dengan dukungan pengembangan usaha mikro dan pemberian transfer barang atau bantuan bagi warga kurang mampu.

Kata Kunci : Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya : “6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 8. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah 6-8).¹



¹ *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 973.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Bunda dan Ayah tercinta Jaimah dan Joko Kuswanto, Kakak-kakak dan Adik-adik tercinta Choirun Nasir, Nanik Jariah, Andi Prasetio, Iin Anggraini, Ahmad Faizal, Muhamad Hafizd Sabana, Hamka Diega Prasetio, Ahmad haidar muzaki dan Suami tercinta Muhamad Rafiq Sadzali. Dan Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan yang menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.



RIWAYAT HIDUP

Inda Sundari, dilahirkan di Raman Utara pada tanggal 06 Februari 1997, anak ke-tiga dari empat bersaudara merupakan putri dari pasangan Bapak Joko Kuswanto dan Ibu Jaimah. Pendidikan dimulai Sekolah Dasar Negeri 3 Raman Fajar lulus pada tahun 2009, MTSN Raman Utara lulus pada tahun 2012, SMK Darul A'mal Metro lulus pada tahun 2015. Mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Syariah di UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun Akademi 2015.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya. Dialah dzat yang menggenggam nyawa setiap makhluk Nya. Tanpa Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Shalawat salam selalu tumpah limpa kepada pemimpin umat, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi sosok yang cerdas secara spiritual, dan dari masyarakat paganisme yang primitive menjadi komunitas bertauhid yang madani, dari masyarakat yang berperangai kasar menjadi masyarakat yang santun, dari masyarakat yang tidak dikenal oleh peradaban menjadi umat yang memimpin peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

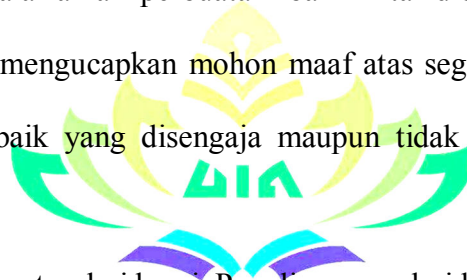
Pada penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak

yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia Nya.
2. Kedua orang tua Bpk Joko Kuswanto dan Ibu Jaimah, kakak-kakak dan adik-adik dan suami tercinta beserta keluarga yang selalu memberi semangat dan motivasi selama penulis menempuh studi dibangku kuliah.
3. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
5. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.
6. Bapak H. Supaijo, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia M.EK. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi ini

8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang lebih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah 2015 khususnya kelas A dan yang tercinta Fitri, Rumai, Eva, Marsha, Ceni, Ani dan Hida, dan KKN 37 yang tercinta keluarga Mahoni Diah, Dwi, Indra dan Darma. Dan seluruh pihak yang yang tidak dapat penulis menyebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah kami mohon ampunan.



Demikian pengantar dari kami, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juli 2019
Penulis

Inda Sundari
NPM.1551010197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	5
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan	20
1. Definisi dan Ukuran Kemiskinan	21
2. Indikator Jumlah Penduduk Miskin	25
3. Penyebab Kemiskinan	27
4. Teori Penyebab Kemiskinan	27
5. Kemiskinan dalam Perspektif Islam	30
B. Pengangguran	39
1. Definisi Pengangguran.....	39

2. Jenis-jenis pengangguran	40
3. Bentuk-bentuk Pengangguran	41
4. Teori Pengangguran.....	42
5. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan	46
6. Pengangguran dalam Perspektif Islam.....	47
C. Indeks Pembangunan Manusia.....	49
1. Definisi dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia	49
2. Teori Indeks Pembangunan Manusia.....	53
3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia	53
4. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam.....	54
D. Upah Minimum	58
1. Definisi dan Dasar Hukum Upah	58
2. Penggolongan Upah.....	60
3. Jenis-jenis Upah.....	61
4. Penetapan Upah Minimum.....	62
5. Teori Upah.....	65
6. Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan.....	67
7. Upah Minimum dalam Perspektif Islam	68
E. Penelitian Terdahulu	71
F. Kerangka Berfikir	74
G. Hipotesis	75

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	78
B. Jenis dan Sumber Data	79
C. Metode Pengumpulan Data	80
D. Penelitian Variabel dan Definisi Operasional Variabel	81
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	83
1. Analisis Data Panel.....	83
2. Spesifikasi Model Regresi.....	87
3. Analisis Uji Data Hipotesa	88

a. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)	88
b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	89
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	91
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung	91
2. Analisis Deskripsi Objek Penelitian	96
a. Jumlah Penduduk Miskin	96
b. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	97
c. Indeks Pembangunan Manusia	98
d. Upah Minimum.....	100
B. Analisis Data	101
1. Analisis Data Panel	101
2. Pemilihan Model Regresi	107
3. Pengujian Statistik	109
4. Interpretasi Koefisien <i>Random effect</i>	113
C. Pembahasan	118
1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin	119
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin	121
3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin..	124
4. Penanggulan Kemiskinan dalam Perpektif Islam	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2010-2017.....7
Tabel 1.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah Tahun 2012-20178
Tabel 1.3	Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017..... 11
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017 13
Tabel 1.5	Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017..... 15
Tabel 4.1	Hasil Regresi Data Panel Dengan Metode <i>Common Effect</i> 101
Tabel 4.2	Hasil Regresi Data Panel Dengan Metode <i>Fixed Effect</i> 103
Tabel 4.2	Hasil Regresi Data Panel Dengan Metode <i>Random Effect</i> 105
Tabel 4.4	Hasil Uji <i>Chow</i> 108
Tabel 4.5	Hasil Uji <i>Housman</i> 108
Tabel 4.6	Hasil Uji <i>t</i> 109
Tabel 4.6	Hasil Uji <i>F</i> 111
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 112
Tabel 4.9	Hasil uji <i>Random Effect Model</i> 113
Tabel 4.11	Hasil Uji <i>t</i> Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka..... 119
Tabel 4.12	Hasil Uji <i>t</i> Variabel Indeks Pembangunan Manusia 122
Tabel 4.12	Hasil Uji <i>t</i> Variabel Upah Minimum..... 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teori Lingkaran Kemiskinan	21
Gambar 2.2	Kurva Kuznets	29
Gambar 2.3	Keseimbangan Permintaan Dan Permintaan Tenaga Kerja.....	44
Gambar 2.4	<i>Excess Supply Of Labor</i>	45
Gambar 2.5	<i>Excess Demand For Labor</i>	45
Gambar 2.6	Kerangka Pikir	69
Gambar 4.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017	96
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017.....	98
Gambar 4.3	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017	99
Gambar 4.4	Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017	100

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah Tahun 2011-2017.
2. Data Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017.
3. Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017.
4. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017.
5. Hasil Regresi *Cammon Effect*
6. Hasil Regresi *Fixed Effect*
7. Hasil Regresi *Random Effect*
8. Hasil Uji *Chow*
9. Hasil Uji *Housman*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal yang digunakan untuk mendapat gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, di harapkan tidak akan terjadi kesalah fahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi ini berjudul “*Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2017)*”. Guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam penafsiran dari judul skripsi ini, maka penulis perlu memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dimaksud dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.² Yang merupakan penelitian yang mencari atau pertautan

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1045.

nilai antar suatu variabel dengan variabel lain, sehingga dari kedua variabel atau lebih menghasilkan sesuatu hubungan yang baru.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.³

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia adalah proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.⁴ Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut.

4. Upah Minimum

Upah minimum atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diterima setiap pekerja.⁵

5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.⁶

³Bhowi Dewananda, *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

⁴Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, April 2013).

⁵Bhowi Dewananda, *Analisis Pengaruh Upah Minimum*,

⁶Shinta Setya Ningrum, *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, Desember 2017), h. 2.

6. Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada al-Quran dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.⁷

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam perpektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2017).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2017)” sebagai berikut:

1. Secara Obyektif

Berhasilnya pembangunan disuatu daerah mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam suatu pembangunan daerah dapat dikatakan berjalan dengan baik jika tingkat kesejahteraan meningkat. Dan tercerminnya

⁷Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.16

suatu daerah berhasil dalam pembangunan dilihat dari laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung belum begitu berhasil dimana kemiskinan Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga tertinggi sejak tahun 2011-2015 dibandingkan Provinsi lain se- Sumatera yaitu dengan rata-rata 14,90 persen dibawah Provinsi Aceh 18,34 persen dan provinsi Bengkulu 17,49 persen. Meskipun telah terjadi penurunan persentase kemiskinan selama tahun 2011-2015 akan tetapi angka penurunannya sangat kecil.

Apabila dilihat dari keadaan letak geografis Provinsi Lampung yang merupakan gerbang atau lalu lintas utama kegiatan ekonomi antar wilayah pulau Jawa dan Sumatera, yang dimana memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa. Seharusnya dalam potensi tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan Provinsi Lampung, sehingga menekan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. Tetapi kenyataannya Provinsi Lampung tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di pulau Sumatera. Maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung, khususnya variabel-variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah minimum.

2. Secara Subjektif

- a. Karena sumber data dan sumber referensi terkait dengan judul penelitian telah tersedia di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- b. Kajian dalam judul penelitian ini sesuai dengan kajian keilmuan penulis, yaitu Ekonomi Islam yang berkonsentrasi pada Ekonomi Pembangunan.

C. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara. Salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi pengangguran, dengan sendirinya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.⁸

Pada zaman yang serba global ini, peranan pemerintah sangatlah penting untuk melakukan pembangunan ekonomi, khususnya kunci menuju masyarakat yang lebih makmur. Sesuai dengan fungsi pemerintah menurut Dumaury adalah alokasi, distribusi, stabilisasi dan dinamisasi. Yang dimana peran pemerintah tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan pembangunan yaitu dalam pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan.⁹ Peran pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dengan peranan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, pembangunan daerah dalam pembangunannya diupayakan dapat berjalan searah apa yang menjadi

⁸I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pdrb Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*, (E-Jurnal EP Unud), h. 1-2 .

⁹Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), h.74.

pembangunan nasional. Pembangunan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pada tahun 1998 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan yang disebabkan krisis moneter kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa.¹⁰ Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990) di media masa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut World Bank, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif dari 40,08 % pada tahun 1976 menjadi 17,42 % ditahun 1987. Suatu penurunan yang cukup drastis selama kurun waktu 10 tahun.¹¹

Kemiskinan terus menjadi masalah utama dunia, khususnya di Indonesia yang menjadi negara berkembang.¹² Kemiskinan yang terjadi pada suatu negara menjadi permasalahan yang sangat serius, karena pada masa sekarang kemiskinan membuat masyarakat Indonesia tidak bisa mencukupi kehidupannya. Kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali pada Indonesia.¹³

¹⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 298.

¹¹ *Ibid.*,

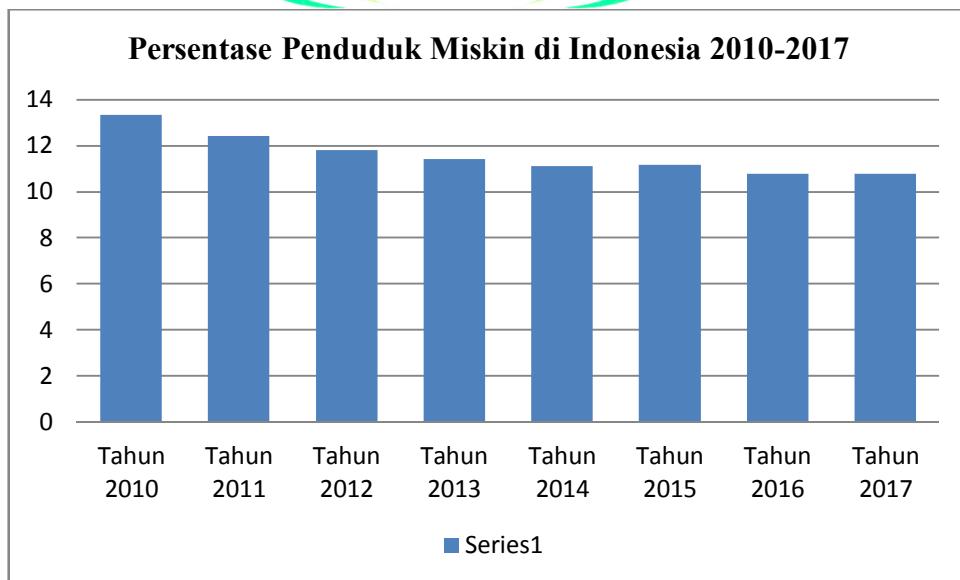
¹² Shinta Setya Ningrum, *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran ...*, h. 1.

¹³ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indoneesia, 2009), h. 81.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dikonseptualiskan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi. Tingginya persentase jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, dikarenakan pendapatan perkapita mereka rendah. Keadaan ini diperparah lagi jika tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut juga tinggi.¹⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010-2017 Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap dan dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu:

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2010-2017



Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2017

¹⁴Harlik,dkk. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*. (Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013), h.3.

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan data presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia secara telah mengalami penurunan yang secara bertahap yaitu sebanyak 2.95 persen, 13.33 persen pada tahun 2010 menjadi 10.38 persen pada tahun 2017. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, tetapi Upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin belum tercapai secara maksimal.

Berhasilnya pembangunan disuatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat, yang tercermin dalam laju penurunan jumlah penduduk miskin. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung nampaknya belum begitu berhasil. Berikut adalah data penduduk miskin menurut data BPS Provinsi Lampung 2011-2017 yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung
Menurut Daerah Tahun 2011-2017

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	15.99	15.13	13.96	13.7	14.18	15.06	14.32
Tanggamus	17.06	16.1	15.24	14.95	14.26	14.05	13.25
Lampung Selatan	19.23	18.19	17.09	16.77	16.27	16.16	15.16
Lampung Timur	19.66	18.59	17.38	17.05	16.91	16.98	16.35
Lampung Tengah	15.76	14.96	13.37	13.13	13.3	13.28	12.9
Lampung Utara	26.33	25.16	23.67	23.32	23.2	22.92	21.55
Way Kanan	17.63	16.54	15.36	15.03	14.61	14.58	14.06
Tulang Bawang	10.11	9.43	8.04	8.66	10.25	10.2	10.09
Pesawaran	19.06	18.01	17.86	17.51	17.61	17.31	16.48
Pringsewu	11.62	11.01	9.81	9.83	11.8	11.73	11.3
Mesuji	8.07	7.69	5.81	6.57	8.2	8	7.66

Tulang Bawang Barat	7.11	6.73	6.31	7.12	8.23	8.4	8.11
Pesisir Barat	-	-	-	-	15.81	15.91	15.61
Bandar Lampung	13.61	12.65	10.85	10.6	10.33	10.15	9.94
Metro	12.9	12.09	11.08	10.82	10.29	10.15	9.89
Provinsi Lampung	1230.16	15.65	14.39	14.21	14.35	14.29	13.69

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin provinsi Lampung mengalami Laju penurunan yang signifikan, selama tahun 2011 sampai 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan, dilihat dari tahun 2011-2017 jumlah penduduk miskin yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara mencapai 23,73 persen, sedangkan kabupaten/kota Pesawaran berada pada urutan kedua mencapai 17,69 persen dan yang terendah Kabupaten/Kota Mesuji 7,42 persen.

Dilihat dari keadaan geografis Provinsi Lampung yang merupakan gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang memiliki potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional yang ditunjang dari Sumber Daya Alam yang di miliki oleh Provinsi Lampung. Seharusnya Provinsi Lampung potensi ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga pendapatan Provinsi Lampung sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang tinggi. Tetapi realita yang terjadi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera.

Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima.¹⁵ Di samping itu, penyebab kemiskinan yang terdapat pada teori Menurut lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) adalah adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah.¹⁶

Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar.¹⁷ Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus memberhentikan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Hilda Nureni Lubis, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017), h. 6.

¹⁷ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 86, cet. Ke-8.

Pengangguran yaitu pertambahan tenaga kerja yang tidak dapat diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.¹⁸ Dalam ilmu kependudukan (*demografi*), orang yang mencari kerja masuk dalam penduduk disebut angkatan kerja. Dapat dikatakan angkatan kerja adalah seseorang yang berusia 15-64 tahun yang dalam bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi apabila orang yang dalam angkatan kerja tidak bekerja maka disebut pengangguran.¹⁹

Dalam pengangguran terdapat pengangguran terbuka (*open unemployment*) yakni tenaga kerja yang menganggur penuh, selain menghadapi pengangguran terbuka, tenaga kerja yang berada di kota-kota menghadapi pula masalah pengangguran terselubung (*underemployment*) yakni penggunaan tenaga kerja yang lebih rendah dari jam kerjanya yang normal. Dalam pengangguran terbuka jenis ini banyak ditemukan di kota yang sedang berkembang. Berikut ini disajikan data jumlah tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017:

Tabel 1.3
Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	2.84	2.28	2.52	2.18	3.55	2.73	0.96
Tanggamus	6.08	3.24	4.88	4.6	5.72	5.15	5.08
Lampung Selatan	8.4	6.1	6.25	6.05	5.38	5.72	4.8

¹⁸Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses*, h. 89.

¹⁹Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), h. 376, edisi 3.

Lampung Timur	4.83	2.77	5.48	5	4.49	4.74	3.89
Lampung Tengah	3.86	2.64	3.33	2.48	2.94	2.71	3.08
Lampung Utara	6.53	8.1	7.4	5.57	7.62	6.55	5.62
Way Kanan	3.49	3.36	4.19	3.35	3.53	3.44	2.88
Tulang Bawang	6.08	5.59	4.38	4.15	5.29	4.7	3.47
Pesawaran	7.33	6.62	9.6	8.54	7.27	7.92	5.73
Pringsewu	7.47	5.98	3.76	3.78	3.85	3.81	4.63
Mesuji	7.96	4.25	9.51	0.81	5.06	2.9	0.65
Tulang Bawang Barat	4.28	1.99	3.61	5.13	2.61	3.83	1.86
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	2.71
Bandar Lampung	12.09	12.32	10.67	8.29	8.51	8.4	8.1
Metro	11.08	11.48	4.36	4.23	5.12	4.68	4.64
Provinsi Lampung	6.38	5.2	5.69	4.79	5.14	4.62	4.33

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dilihat ditahun 2011-2017 yang tertinggi adalah di kabupaten/kota Bandar lampung, dimana Kabupaten/kota Bandar Lampung pada tahun 2017 mencapai 8.10 persen, sedangkan kabupaten/kota Pesawaran berada pada urutan kedua mencapai 5.73 persen dan disusul kabupaten/kota Lampung Utara sebesar 5.62 persen dan yang terendah Kabupaten/Kota Mesuji 0.65 persen.

Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional, seperti pada Provinsi Lampung yang dimana tingkat pengangguran terbuka yang tiap tahun mengalami penurunan. Maka tersebut menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antardaerah. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut.

Menurut pandangan *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan.²⁰ Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2011-2017

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	61.92	62.51	63.21	63.54	64.54	65.45	66.06
Tanggamus	60.63	61.14	61.89	62.67	63.66	64.41	64.94
Lampung Selatan	61.95	62.68	63.35	63.75	65.22	66.19	66.95
Lampung Timur	64.1	65.1	66.07	66.42	67.1	67.88	68.05
Lampung Tengah	64.71	65.6	66.57	67.07	67.61	68.33	68.95

²⁰ Aisyah Sisnita *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah , 2017), h. 4.

Lampung Utara	62.67	62.93	64	64.89	65.2	65.95	66.58
Way Kanan	62.04	62.79	63.92	64.32	65.18	65.74	65.97
Tulang Bawang	63.67	64.11	64.91	65.83	66.08	66.74	67.07
Pesawaran	59.44	59.98	60.94	61.7	62.7	63.47	64.43
Pringsewu	64.86	65.37	66.14	66.58	67.55	68.26	68.61
Mesuji	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72	61.87
Tulang Bawang Barat	60.13	60.77	61.46	62.46	63.01	63.77	64.58
Pesisir Barat	-	-	58.95	59.76	60.55	61.5	62.2
Bandar Lampung	72.04	72.88	73.93	74.34	74.81	75.34	75.98
Metro	72.23	72.86	74.27	74.98	75.1	75.45	75.87
Provinsi Lampung	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Lampung dari tahun 2011 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yang signifikan disetiap tahunnya, kecuali pada kabupaten/kota yang terjadi di Tanggamus yang mengalami fluktuasi pada indeks pembangunan manusianya.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat atau jumlah penduduk miskin disuatu wilayah adalah kebijakan upah minimum. Di Indonesia masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat jumlah kemiskinan disuatu wilayah.²¹ Upah adalah salah satu yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah adalah suatu kompensasi yang diterima satu unit tenaga kerja yang berupa uang yang diberikan kepadanya.

Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan berkembang sejak awal tahun 1970 dengan bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka

²¹Achmad Habibi, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011)*, (Skripsi dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Semarang, 2013), h. 7.

panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.²² Sehingga dapat diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktifitas kerja dan kesejahteraan buruh yang mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berikut ini disajikan tentang gambaran kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2017:

Tabel 1.5
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung
Tahun 2011-2017 (Rupiah)

Wilayah	Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Tanggamus	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Lampung Selatan	855000	975000	1150000	1402000	1595000	1800500	1973798
Lampung Timur	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763100	1908556
Lampung Tengah	862500	982000	1154500	1400000	1588000	1770620	1916696
Lampung Utara	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1921670
Way Kanan	866000	983000	1160000	1408000	1590000	1763000	1950000
Tulang Bawang	863000	982000	1155000	1401000	1585500	1771200	1917324
Pesawaran	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Prengsewu	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Mesuji	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Tulang Bawang Barat	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1792100	1939948
Pesisir Barat	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Bandar Lampung	855000	981000	1165000	1422500	1649500	1870000	2054365
Metro	855000	975000	1150000	1420000	1582000	1764000	1909530
Provinsi Lampung	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

²² *Ibid.*,

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan seberapa besar upah minimum provinsi Lampung dari tahun 2010-2016, upah minimum provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2010 upah yang terendah pada Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Metro, sebesar 767.500 dan yang tertinggi yaitu kota Bandar Lampung sebesar 776.000, pada tahun 2016 upah minimum terendah pada Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji sebesar 1.763.000 dan yang tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 1.870.000.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengukur seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perpertif Ekonomi Islam.

Penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Wishnu Adhi Saputra, “Analisis Jumlah Penduduk PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota/ Kabupaten Jawa Tengah”.²³ Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB dan IPM berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis tanda negative bahwa yang mengidentifikasi bahwa semakin tinggi PDRB

²³ Wishnu Adhi Saputra, *Analisis Jumlah Penduduk PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota/ Kabupaten Jawa Tengah*, Skripsi diunduh Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.

dan IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dan pengangguran berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dari penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Riana Puji Lestari “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015”.²⁴ Memperoleh hasil bahwa menghasilkan bahwa IPM berpengaruh secara negatif tidak signifikan, Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan dan PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan. Memperoleh hasil tentang IPM dan PDRB yaitu bahwa variabel IPM dan PDRB mempunyai tanda negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM dan PDRB, maka akan menurunkan tingkat kemiskinannya. Namun berbeda dengan hasil pengangguran berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dari penelitian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Habibi, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study

²⁴ Riana Puji Lestari, *Analisis Pengaruh IPM, Pengangguran, Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*, Skripsi diunduh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011)”²⁵. Memeroleh hasil bahwa upah dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis tanda positif dalam pengangguran yang mengidentifikasi bahwa semakin rendah pengangguran maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dan upah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dari penelitian.

D. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Secara khusus dalam penelitian ini akan mengulas secara jelas mengenai hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk

²⁵ Achmad Habibi, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011), Skripsi diunduh Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013.

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017 miskin secara simultan?

3. Bagaimana penangulan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam perpektif ekonomi islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017 secara parsial.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017 secara simultan.
- c. Untuk mengetahui penangulan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam perpektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan adalah untuk melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan sudut pandang Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna berkaitan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung atau tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan perencanaan pembangunan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. KEMISKINAN

1. Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Dikatakan besar karena jika masalah ini berlarut-larut atau dibiarkan semakin parah, pada ahirnya akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius.²⁶ Dimana suatu pemerintahan bisa jatuh karena ditemukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya.

Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang individu dimana mereka tidak memil iki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologi, maupun dimensi spiritual.²⁷ Pengertian tersebut secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standart hidup minimum. Dimana kemiskinan dikaitkan dengan standart hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu.

²⁶ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.81.

²⁷ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h.68.

Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya ditinjau dari dua sisi, yaitu: *kemiskinan absolute* dan *kemiskinan relatif*.²⁸

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini didefinisikan jumlah penduduk yang hidup digaris bawah kemiskinan tertentu.²⁹ Atau seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.³⁰

Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan, atau dengan kata

²⁸ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*, (Yogyakarta: YKPN, 2000), h. 102, cet. Ke2.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Harlik. dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*, (Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No.2, 2013), h. 4.

lain kemiskinan relatif sangat erat kaitan dengan masalah distribusi pendapatan.³¹ Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standart minimum dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Badan pusat statistik menggunakan indikator atau Patokan yang mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi. Dimana kemiskinan yang terdiri dari memenuhi standart kebutuhan makanan atau disebut Garis Kemiskinan Makanan (GKM), GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Dan memenuhi standart kebutuhan non makanan yaitu Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.³²

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada berdasarkan norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan konsumsi (*consumption- based poverty line*) terdiri dari

³¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, h. 102.

³² Ukuran kemiskinan menurut BPS (Online) tersedia di: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> Diunduh pada tanggal 26 January 2019, pukul 06:33 WIB.

dua elemen, yaitu: Pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standart gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. Kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³³

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan atau telah berkembang dan sangat bervariasi, bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development* (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :³⁴

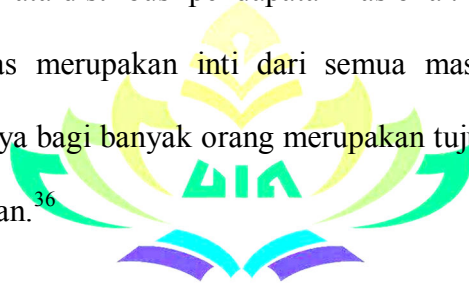
- a. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
- b. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup

³³ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, h.103.

³⁴ Harlik. dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan*, h. 4.

- c. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.³⁵

Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). Kemiskinan relatif merupakan ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya terkait dengan ukuran dibawah tingkat rata-rata distribusi pendapatan nasional. Penanggulan kemiskinan yang meluas merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan sesungguhnya bagi banyak orang merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan.³⁶



2. Indikator Kemiskinan

Ada banyak penjelasan mengenai indikator kemiskinan, menurut mudrajad Kuncoro, indikator kemiskinan ada dua yaitu:³⁷

- a. Garis Kemiskinan BPS, dimana Batasan tentang garis kemiskinan yang digunakan setiap Negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi

³⁵ Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 22.

³⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009, h. 251, edisi ke-11.

³⁷ Mudrarad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, h.116.

kebutuhan minimum makanan dengan acuan yang digunakan 2.100 kalori perhari. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

- b. Garis kemiskinan, garis kemiskinan lain yang paling dikenal adalah garis kemiskinan professor Sajogyo, yang mendalam selama bertahun-tahun menggunakan kemiskinan yang didasarkan dengan beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras.

Menurut Foster dkk, ada tiga indikator yang diperkenalkan untuk mengukur kemiskinan, antara lain:³⁸

- a. *The incidence of poverty* yaitu presentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan.
- b. *The depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan *Poverty Gap Index*. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.
- c. *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari

³⁸ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, h. 96-97.

garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan *distributionally sensitive index* dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

3. Penyebab kemiskinan

Penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan yaitu meneurut Sharp, menjelaskan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Antara lain:³⁹

- a. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan berkualitas rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, yang pada gilirannya upahnya pun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

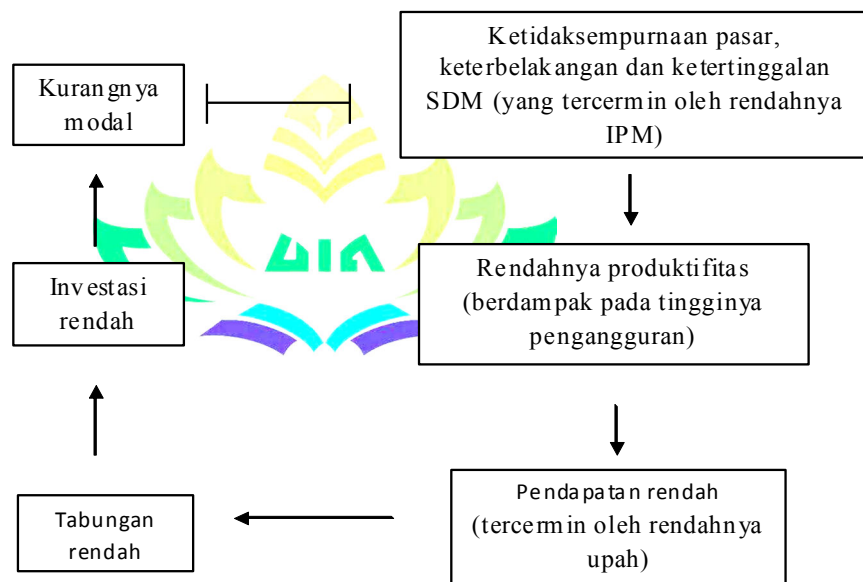
4. Teori Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan ini bermuara dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut atau pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circke of poverty*), yang dimana menurut Nurkse penyebab kemiskinan adalah adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal

³⁹ Mudrarad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, h.106-107.

menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada Rendahnya investasi dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah.⁴⁰

Gambar 2.1
Teori Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle Of Poverty*)

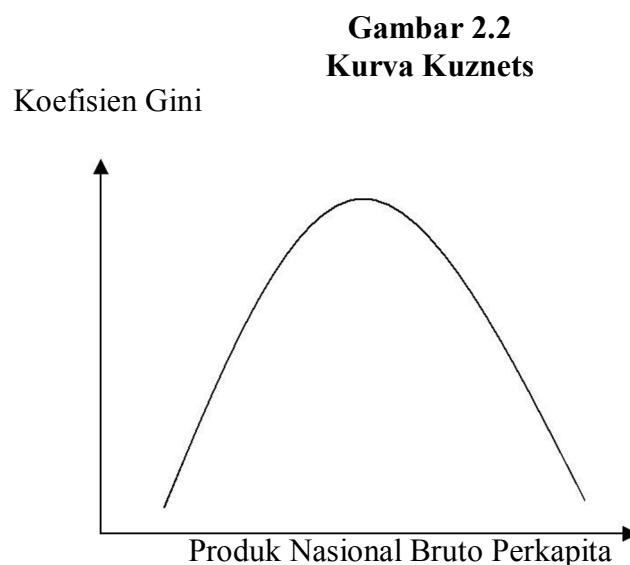


Teori tersebut yang mengemukakan tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan, “*A poor country is because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

⁴⁰ Mudrarad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, h.107

Hal tersebut, dimana negara memiliki produktivitas yang rendah, maka rendahnya produktivitas akan menghasilkan penghasilan masyarakat yang rendah pula, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat. Rendahnya tabungan maka investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, dan berputar.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi, dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengutip dari Tulus Tambunan hipotesis Kuznets. Berikut kurva Kuznets yang menggambarkan korelasi pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan, yaitu :⁴¹



⁴¹ Michael P. Todaro dan dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi ...*, h. 255.

Tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, namun pada saat mendekati tahap akhir distribusi pendapatannya akan membaik dan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan.⁴² Dengan demikian, artinya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan.

5. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Pandangan islam dalam kemiskinan merupakan sesuatu masalah yang sangat kompleks, yang sangat tidak diinginkannya. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa' 4: 9, sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An Nisa’: 9).⁴³

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih

⁴² Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* h. 85-86

⁴³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran (dibawah naungan Al-Qur'an (Surat Ali-Imran – An-Nisaa 70, jilid 2)*, (Depok: Gema Insani, 2006), h. 287.

luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau ada yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).⁴⁴

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal dan dihadapi oleh berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Multidimensi dalam hal ini adalah bahwa kemiskinan tidak hanya dapat diukur dalam satu aspek, misalnya hanya diukur dari aspek ekonomi saja, tetapi dapat diukur pula melalui pendekatan kebutuhan spiritual masyarakat.⁴⁵

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu fakir dan miskin.⁴⁶ Fakir adalah keadaan seseorang dimana ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, ia tidak mampu melakukan usaha apapun seperti orang cacat dan orang lanjut usia. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki

⁴⁴Naelur Edwin Kiky Aprianto, *Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 No. 2 Juli - Desember 2017), h. 177.

⁴⁵Nono Hartono, *Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 No. 2 Juli - Desember 2018), h.212.

⁴⁶An Nisaa' Siti Humanira, *Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh)*. Jurnal The Moslem Planners #1, April-Mei : 2013.

kemampuan untuk mencari nafkah akan tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.⁴⁷

Menurut Al Ghozali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani atau spiritual.⁴⁸ Kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka.

Dalam Islam kemiskinan merupakan suatu ujian sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 155 sebagai berikut:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالنَّمْرِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah [2: 155]).⁴⁹

Allah memberikan bahwa Dia akan menguji hamba-hamba-Nya seperti yang dijelaskan dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 155 diatas.

Terkadang Dia memberikan ujian berupa kebahagiaan dan pada saat orang

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 23.

⁴⁹ Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1) penerjemah M. Abdul Ghoftar dkk., (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 305.

lain Dia memberi ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan. Oleh karena itu, Allah berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.⁵⁰

Manusia diperintahkan untuk bekerja keras dan terus bersabar, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang diusahakan oleh manusia, dimana setiap hambanya yang mau berusaha dan mau bekerja keras pasti akan dan juga bersabar. Barangsiapa bersabar, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan duniawi.⁵¹

a. Penyebab Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Islam mengakui perbedaan si kaya dan si miskin, ada yang diberikan rezeki lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin). Miskin dan kaya dalam Islam merupakan suatu keniscayaan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Isra/ 17:30, sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra/17:30).*⁵²

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam ...* h. 23.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 455.

Salah satu sebab utama kekikiran adalah rasa takut terjerumus dalam kemiskinan, maka lebih lanjut ayat ini mengingatkan .Ayat ini menjelaskan bahwa rezeki yang tersediakan oleh Allah untuk setiap hamba-Nya mencukupi masing-masing yang bersangkutan. Dari satu sisi manusia hanya untuk berusaha semaksimal mungkin guna memperolehnya, kemudian menerimanya dengan rasa puas disertai dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik untuknya masak kini dan masa akan datang.⁵³

Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja. Memiliki *skill* atau keterampilan sesuai dengan kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Swt.⁵⁴

Adapun jenis-jenis gejala atau penyebab kemiskinan. Secara umum ada tiga gejala kemiskinan, yaitu:⁵⁵

1) Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang sejak lahir, dikarenakan terlahir dari keluarga miskin, dan hidup dalam lingkungan miskin.

2) Kemiskinan Kultural

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Emily Nur Saidy dan Nurul Hidayah, *Fenomena Kemiskinan ...*, h. 44-45.

⁵⁵ Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maslahah Volume 13 Nomor 1 April 2017. h. 75

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, seperti gaya hidup malas bekerja sehingga terjebak dalam jurang kemiskinan.

3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yaitu :⁵⁶

- 1) Kemiskinan timbul akibat kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Mulk / 67 : 21 sebagai berikut :

أَمْ يَدَّبْدَبُوا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ

Artinya: “Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri? (QS. Al Mulk : 21).⁵⁷

- 2) Kemiskinan yang timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya terhadap kelompok yang lain (miskin) sebagaimana diterangkan dalam QS. Al Imron / 3:180 sebagai berikut :

⁵⁶ Retno Wuri, *Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya*. (Jurnal The Moslem Planners #1, Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. April – Mei 2013), h. 4.

⁵⁷ *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 820.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ
 شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ
 وَ الْأَرْضِ ط وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS : Al Imron : 180).⁵⁸

b. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya.

Tujuan islam berusaha mengatasi kemiskinan adalah untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, disamping itu untuk mewujudkan jiwa persaudaraan

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran (dibawah naungan Al-Qur'an (Surat Ali-Imran – An-Nisaa 70, jilid 2)*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.231.

antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Upaya perhatian pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu. Pihak yang mampu ini diharapkan mampu dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan sehingga tingkat kemiskinan dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak memperdulikan kaum miskin, maka mereka disebut sebagai pendusta agama.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'un : 1-3 sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un : 1-3).⁵⁹

Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam antara lain Ilmu para ulama, pemerintah yang adil, kedermawanan kelompok orang-orang kaya, do'anya orang-orang fakir, dan kejujuran para pegawai. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang fakir miskin memiliki akhlak yang baik

⁵⁹ *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 1008.

(dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu masyarakat.⁶⁰

Berikut adalah prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat menjadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu :⁶¹

- 1) Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro poor growth*). melalui dua cara yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil.
- 2) Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (*pro poor budgeting*). dalam sejarah Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro poor budgeting*, yaitu kebijakan fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran.
- 3) Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro poor infrastructure*) sehingga memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- 4) Islam mendorong penyediaan untuk pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro poor public service*), terdapat tiga bidang pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius yaitu: birokrasi, pendidikan dan kesehatan.

⁶⁰ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan*, h. 73.

⁶¹ Retno Wuri, *Bagaimana Islam Memandangnya ...*, h.4.

- 5) Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (*pro poor income distribution*).⁶²

B. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

1. Definisi Pengangguran

Sebelumnya untuk membahas tingkat pengangguran terbuka, maka yang harus diketahui adalah pengangguran. Dimana salah satu aspek untuk mengukur kinerja suatu perekonomian adalah tingkat pengangguran.⁶³ Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang banyak dialami banyak Negara. begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran.⁶⁴

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan.⁶⁵ Artinya seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja perekonomian jika dibandingkan dengan jumlah

⁶² *Ibid.*

⁶³ Tedy Herlambang, dkk. *Ekonomi Makro Teori, Analisis, dan Kebijakan*. (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 27

⁶⁴ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2006), h. 135

⁶⁵ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), h. 376.

pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku.⁶⁶

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang (NSB) menjadi semakin serius.⁶⁷ Pengangguran disebabkan oleh hancurnya sistem sosial sebelum diganti seluruhnya oleh sistem lain. Pada saat yang sama, berkurangnya intensitas modal untuk industri modern menyebabkan berkurangnya kapasitas penerimaan tenaga kerja.

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.⁶⁸

2. Jenis-jenis Pengangguran

Dalam studi ekonomi makro lebih lanjut, pembahasan masalah pengangguran akan dilakukan lebih spesifik dan lebih cermat. Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:⁶⁹

⁶⁶ Agustina Arida, *Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh*, (Jurnal Agrisep Vol (16) No. 1, 2015), h. 5.

⁶⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.358.

⁶⁸ Sussy Susanti, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat*, (Jurnal Matematika Integratif, ISSN 1412-6184 Vol. 9 No. 1, April 2013), h.7.

⁶⁹ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, h. 379-380.

- a. Pengangguran friksional (*Frictional Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran struktural (*Struktural Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
- c. Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur (*Cyclical Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.
- d. Pengangguran musiman (*seasonal Unemployment*), yaitu pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi dengan kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi disektor pertanian.

3. Bentuk-bentuk Pengangguran

Dilihat berdasarkan bentuk-bentuk pengangguran dibagi menjadi empat golongan, sebagai berikut :⁷⁰

- a. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
- b. Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah

⁷⁰ Sussy Susanti, *Pengaruh Produk Domestik*, h. 7.

sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

- c. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*) adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- d. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

4. Teori Pengangguran

a. Teori Keynesian

Teori *Keynesian* yang menyatakan bahwa pekerja semata-mata ditentukan oleh aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu yang *given*. Artinya teori ini banyak melandasi pemikiran tenaga kerja Keynesian. Menurut teori excess suplay dan demand akan tetap ada, karena pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai dengan *Margin Revenue Product Of Labor* (MRPL) atau Produk Pendapatan Margin Dari Tenaga Kerja (tingkat upah).⁷¹

b. Teori Lewis

Teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Akan kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan

⁷¹Teguh Yudo Wicaksono, *Tingkat Upah Inflasi Dan Pengangguran Aplikasi Model Lucas-Rapping Terhadap Pasar Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2000-2001*, (Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Vol. III No. I, Juli 2002), h. 18.

output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerjaan tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk akumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerjaan dari subsisten ke sektor kapitalis modern lancar dan perpindahan tersebut tidak akan berpindah menjadi “terlalu banyak”.⁷²

c. Teori Fei-Ranis

Dalam teori Fei-Ranis mengemukakan bahwa Negara berkembang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak disektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.⁷³

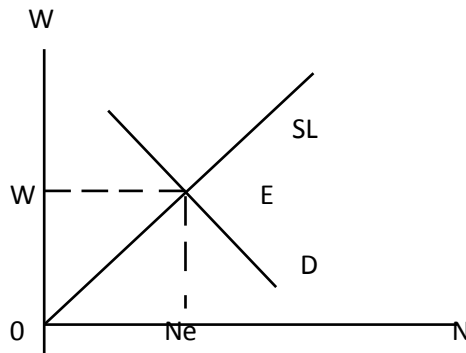
Dari kedua teori Lewis dan Fei-Ranis yang menyatakan bahwa teori pengangguran yang tertera pada teori ketengakerjaan yang menyatakan, salah satu masalah yang muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply for labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut lebih besar penawarannya dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya

⁷² Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 56.

Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia ...*, h. 57.

excess supply of labor) dan lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).⁷⁴

Gambar 2.3
Keseimbangan Permintaan Dan Permintaan Tenaga Kerja



Keterangan: SL = Penawaran tenaga kerja (supply of labor)

DL = Permintaan tenaga kerja (demand for labor)

W = Upah riil

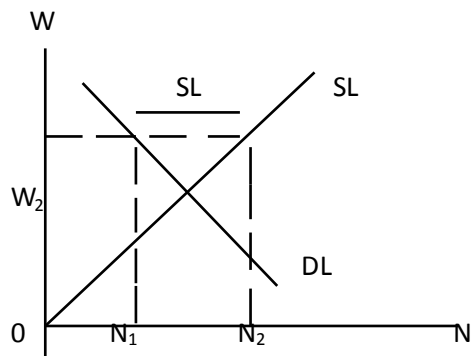
N = Jumlah tenaga kerja

Pada gambar 2.3 menjelaskan, jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar N_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Dengan demikian, Titik keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan W_e , semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut full employment pada tingkat upah W_e .⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

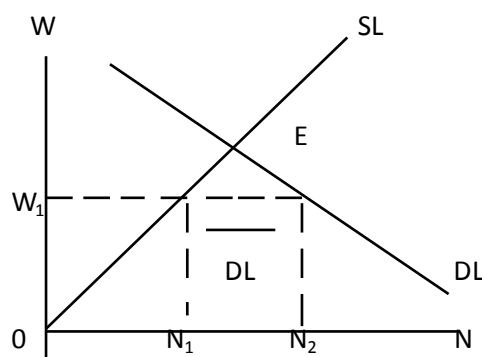
⁷⁵ Luis Marnisah, *Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Tenaga Kerja Perempuan terhadap terjadinya Diskriminasi Upah pada Sektor Industri Sedang di Kota Palembang*, (Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 01, Juni 2017), h. 3-4.

Gambar 2.4
Excess Supply Of Labor



Pada gambar 2.4 menjelaskan, bahwa terlihat adanya ketidakseimbangan yaitu lebih besar penawarannya dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labor*). Pada tingkat upah W_1 , Penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N_2 , sedangkan yang diminta hanya N_1 . Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W_1 sebanyak $N_1 - N_2$.⁷⁶

Gambar 2.5
Excess Demand For Labor



⁷⁶ *Ibid.*,

Pada gambar 2.5 menjelaskan, terlihat adanya ketidakseimbangan yaitu lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess demand for labor*). Pada tingkat upah W2, permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W1 adalah sebanyak N1, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N2.⁷⁷

6. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Besar jumlah pengangguran menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah tersebut. Karena pengangguran yang disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar.⁷⁸ Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.⁷⁹ Dengan rendahnya pendapatan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 86, cet. Ke-8.

⁷⁹ Adit Agus Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007*. Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi dipublikasikan tahun 2010.

7. Pengangguran dalam Perspektif Islam

Selama ini orang beranggapan bahwa mengatasi masalah pengangguran adalah tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi sebenarnya masalah tersebut bukanlah semata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tugas dan tanggung jawab semua pihak, Termasuk tanggung jawab umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik dalam bekerja, karena diyakini kerja membangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara adalah perintah agama.⁸⁰

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Dalam Al-Quran manusia diperintahkan oleh Allah untuk bekerja atau berusaha sesuai dalam firman Allah QS. Al- Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*(QS. Al- Taubah, (9): 105).⁸¹

Setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan menolak semua kemalasan seperti dalam firman Allah QS. Al-Jumuah [62] : 10, sebagai berikut:

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, ..., h.1-3

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 710.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al-Jumuah [62] : 10).⁸²

Perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh carilah rezeki dengan ingatan yakni memperoleh keberuntungan. Islam melarang keras seseorang untuk menjadi pengangguran. Masalah pengangguran berhubungan dengan sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan yang disebabkan karena lapangan kerja yang terbatas atau kualitas sumber daya manusianya yang kurang.

Dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, dengan cara memberikan pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan.⁸³ Fenomena pada masyarakat muslim saat ini, banyak pengangguran pada usia-usia produktif, dan khususnya pengangguran pada kelompok terbuka. Islam sangat mencela

⁸² *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 788.

⁸³ Nurul huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*...., h. 25

pengangguran yang tidak mau bekerja dengan alasan kemalasan, gaji sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang tidak memadai.⁸⁴

C. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

1. Definisi dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.⁸⁵

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas

⁸⁴ Naf'an, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, cetakan ke 1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.139.

⁸⁵ Cassandra, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (Periode Tahun 2008-2013)*, (Skripsi dipublikasikan Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2016), h. 9.

penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan indeks pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas (*productivity*); Pemerataan (*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).⁸⁶

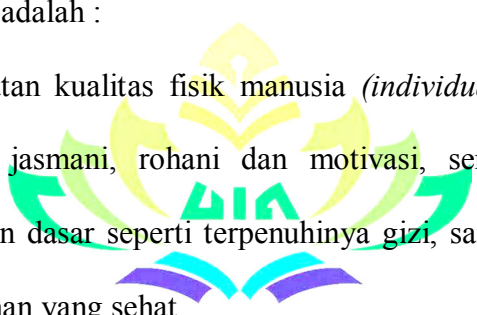
Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat.⁸⁷ Dipihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang lebih utama ditekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan asumsi bahwa aspek kedua akan terpenuhi dengan sendirinya. Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal dan dikembangkan dalam masyarakat terutama pada lingkungan kerja. Perkembangan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Payaman J Simanjuntak, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI 10-12 Desember 1981*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982), h. 9

teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan.⁸⁸

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.⁸⁹ Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral, diantaranya adalah :

- 
- a. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan dan pemukiman yang sehat.
 - b. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
 - d. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, & aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan

⁸⁸ Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2013), h. 5.

⁸⁹ Mohammad Bhakti Setiawan, dkk, *Indeks Pembangunan Manusia*, h. 18-19.

sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.⁹⁰

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, indeks pembangunan manusia juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut.⁹¹

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Keterangan: X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

⁹⁰ Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

⁹¹ Agustina Arida, Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh, (Jurnal Agrisep Vol (16) No. 1 , 2015). h. 5-6.

2. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Dalam teori *Human capital* yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.⁹² Sehingga dapat dikatakan dalam teori tersebut bahwa seseorang jika melakukan peningkatan dalam pendidikan maka ia akan mendapatkan peningkatan penghasilan juga atau tidak mengalami pengangguran yang tinggi. Hal tersebut yang cukup menarik dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai tingkat pengangguran yang cukup tinggi, berbeda dengan halnya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah justru memiliki tingkat pengangguran yang rendah juga.

3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antardaerah. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.⁹³

⁹² Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 93.

⁹³ Aisyah Sisnita *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah, 2017), h. 4.

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.⁹⁴ Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.⁹⁵

4. Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Islam

Kemakmuran suatu masyarakat tidak serta merta dapat diraih oleh negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah apabila tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam tersebut.⁹⁶ Sebaliknya, sebuah Negara yang miskin sumber daya alam, namun memiliki sumber daya manusia yang menguasai, maka negara ini akan lebih cepat berkembang daripada negara yang kaya akan sumber daya alam.

Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemakmuran sebuah negeri. Sumber daya manusia memiliki peran ganda yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, dimana SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, artinya manusia berperan menjadi pelaku

⁹⁴ Lincoln Arsyad, *Loc Cit*, h. 307 .

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Nurul huda, *Ekonomi Pembangunan Islam....*, h.176.

pembangunan yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan dalam sebuah negeri.⁹⁷

Manusia diciptakan pada dasarnya sebagai makhluk sosial dengan kecenderungan untuk saling berinteraksi, bermasyarakat, dan saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dasar ini disebut naluri. Manusia merupakan makhluk yang memiliki peran dalam kehidupan, baik sebagai makhluk sosial atau makhluk ekonomi. Secara alamiah manusia akan berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya tersebut.

Berikut adalah perbedaan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk ekonomi :⁹⁸

a. Manusia sebagai makhluk sosial

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan dapat bertindak seorang diri karena setiap manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*homo socialis*).⁴⁸ Sebagai makhluk sosial manusia melakukan berbagai kegiatan, berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagaimana menurut Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat.

b. Manusia sebagai makhluk ekonomi

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Nurul huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*..., h.176-180.

Setiap manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi oleh karena itu ia akan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang artinya hidup menurut kepentingannya sendiri.

Peran sumber daya manusia dalam perspektif Islam berbeda dengan perspektif konvensional. Hal ini berkaitan dengan filosofi pembangunan ekonomi Islam, yakni :⁹⁹

a. Tauhid

Tauhid berarti bahwa seluruh makhluk hidup dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, dan ketika manusia masih berada di alam arwah mereka berjanji untuk senantiasa beriman kepada Allah SWT. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam, melalui ayat-ayat al-Qur'an telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia,¹⁰⁰ seperti antara lain disebutkan dalam firman Allah Q.S. at-Tin 95:4, sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”(Q.S. atTin/95:4).¹⁰¹

⁹⁹ Ibid.,

¹⁰⁰ Djaelany Haluty, *Islam Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas*, Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, h. 24.

¹⁰¹ *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 820.

Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya.

b. Manusia (*Khilafah fi-al ardh*)

Dasar filosofis ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam konteks individu maupun anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Salah satu tugas manusia dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-baqarah ayat 30, sebagai berikut:



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2] : 30).¹⁰²

Rencana Allah Menciptakan manusia adalah diberi mandat sebagai khalifah atau wakil Allah Swt. untuk mengelola bumi. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik maka yang

¹⁰² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran (dibawah naungan Al-Qur'an)*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.975

harus dilakukan adalah bekerja dengan baik, bekerja dengan baik saja tentu tidak cukup tetapi juga harus dengan semangat yang tinggi.

c. Keadilan

Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata, yakni konsep persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jika dibarengi dengan konsep keadilan. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah QS, Al-Ma'idah Ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (QS, Al-Ma'idah Ayat 8).¹⁰³

D. UPAH MINIMUM

1. Definisi dan Dasar Hukum Upah Minimum

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas

¹⁰³ Bachtiar Surin, *Adz-Zikraa(terjemah dan tafsir Al- Qurann dalam Huruf Arab dan latin Juz 6-10)*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1991), h. 439.

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.¹⁰⁴

Upah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja, dimana hal ini akan menyebabkan output yang dihasilkan tenaga kerja menjadi lebih baik. Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, mengenai upah minimum yang diatur dalam pasal 41 dan 42 . Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1-2) terdiri atas :¹⁰⁵

- a. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Upah bulanan terendah yang terdiri atas :

- 1) Upah tanpa tunjangan: atau
- 2) Upah pokok termasuk tunjangan tetap

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1-2) terdiri atas:

¹⁰⁴ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 141.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 41.

- a. Upah yang minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

2. Penggolongan Upah

a. Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu berdasarkan kepada lamanya pekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.

b. Upah sistem hasil (output)

Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotongan, meter dan kilo gram. Besarnya upah yang diberikan selalu didasarkan kepada hasilnya bukan lama waktu mengerjakannya.

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapannya jasa berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya jasa cukup rumit seperti lamanya mengerjakan dan banyaknya alat yang digunakan untuk menyelesaikannya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

3. Jenis - Jenis Upah

Beberapa jenis-jenis upah menurut Zaeni Asyhadie, diantaranya:¹⁰⁷

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari :

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relative cukup untuk membiayai hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya melainkan kebutuhan sosial keluarganya juga seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

d. Upah Minimum


Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standart oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini

¹⁰⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja ...*, h. 70.

ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota) dan setiap tahun berubah.

e. Upah yang Wajar

Upah yang wajar adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh yang sebagai imbalan atas jasa-jasa pada perusahaan. upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah atar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor sebut diantaranya:¹⁰⁸

- 
- 1) Kondisi perekonomian Negara.
 - 2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada.
 - 3) Peraturan perpajakan.
 - 4) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri.
 - 5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

4. Penetapan Upah Minimum

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagai pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah diatas minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena upah

¹⁰⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja ...*, h. 72.

minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan penangguran.¹⁰⁹

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.¹¹⁰

Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:


$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.¹¹¹

¹⁰⁹ Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam, Macroeconomics 6th Edition*, Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 161.

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, *Tentang Pengupahan*, BAB IV, Pasal 43-45.

¹¹¹ *Ibid.*

Pemerintah menetapkan upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Adapun tujuan ditentukannya penetapan upah minimum yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenagakerjaan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Untuk mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standart hidup secara normal.¹¹²

Para ekonomi percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar dalam pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja muda cenderung rendah karena dua alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, mereka cenderung memiliki produktivitas marginal yang rendah. Kedua, para pemuda seringkali mengambil sebagian dari kompensasi mereka dalam bentuk *on the job training*

¹¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 71.

daripada bayaran langsung. Karena itu dalam angkatan kerja, upah sering kali berpengaruh pada para pemuda daripada yang lainnya.¹¹³

BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah:

- a. Tidak miskin. adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610,-
- b. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- sampai Rp 11.687,- per orang per hari.
- c. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 9.350,- per orang per hari.
- d. Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari.
- e. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya.

5. Teori Upah

- a. Teori Jhon Stuart Mills

Salah seorang tokoh mazhab klasik yaitu Miils, berpendapatan tentang upah menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak akan

¹¹³Gregory Mankiw, *Loc. Cit.*,

beranjak dari tingkat semula. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian dari dananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah. Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah.

Masa dimana pendapatan ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara misal dengan upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu menghargainya pemimpin usaha terhadap peranan tenaga kerja.¹¹⁴

b. Teori kelompok Neoklasik


Masih termasuk klasik karena sependapat dengan mereka tentang pentingnya kebebasan berusaha. Pembaruan yang diajukan antara lain terletak pada perubahan dalam sikap yang meninggalkan pesimisme. Inti usulan yang diajukan adalah bahwa tingkat upah dapat saja tinggal asal sesuai dengan produk marginalnya. Memang menurut mazhab ini tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal. Mazhab ini memberi kemungkinan bahwa tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen. Karena tingkat upah juga

¹¹⁴ Arfida Br, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007). h.150.

tidak sama untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah.

Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktifitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang disikan kedalam diri tenaga kerja. Makin banyak modal yang masuk, makin tinggi kualitasnya, modal yang dimaksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja dan kesehatan mereka. Jalan pikiran mazhab neoklasik ini masih mendominasi jalan pikiran sekarang. Yang dimana memodifikasi sana-sini sudah barang tentu ada.¹¹⁵

d. Teori Mankiw



Dalam teori *mankiw* yang menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.¹¹⁶ Teori tersebut dapat diartikan dalam kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau meningkatkan pengangguran yang ada, dalam meningkatkan pengangguran maka dengan secara otomatis akan menambah jumlah penduduk miskin di suatu wilayah tersebut.

6. Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standart hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan

¹¹⁵ Arfida Br, *Ekonomi Sumber Daya Manusia ...*, h. 150-151.

¹¹⁶ Desi Ajeng Rahayu, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pengangguran terdidik di Pulau Sumatera Ditinjau dari Persektif Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.¹¹⁷

Kebijakan upah juga sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang semakin hari mengalami fluktuasi harga (inflasi). Sistem pemberian upah yang diatur merupakan sumber penghasilan, semakin meningkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan.¹¹⁸

7. Upah Minimum dalam Perspektif Islam

Upah dalam islam disebut *ujrah* yaitu bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Menurut ulama' Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang

¹¹⁷ Fitriani, *Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Aceh*, Skripsi Diunduh Universitas Teuku Umar meulaboh, Aceh Barat 2016.,

¹¹⁸ Hilda Nureni Lubis, *analisis pengaruh Indeks ...*, h. 7.

telah diberikan oleh tenaga kerja.¹¹⁹ Sesuai dalam firman Allah QS. An-Najm : 39, sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”(QS. An-Najm : 39).¹²⁰

Seseorang tidak dihisab kecuali berdasarkan usaha, upaya dan amalnya. Dia tidak memperoleh tambahan sedikitpun dari hasil usaha orang lain dan tidak mengurangi sedikitpun karena diberikan kepada orang lain. Kehidupan di dunia ini merupakan kesempatan yang diberikan kepadanya supaya berusaha dan beramal. Jika meninggal, hilanglah kesempatannya untuk beramal.¹²¹

Islam menganjurkan agar disegerakan gaji dibayarkan kepada pekerja, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).¹²²

Hadis di atas memberikan penjelasan agar para majikan membayarkan gaji sebagai hak pekerja sebelum keringatnya kering. Akan tetapi kesimpulan ini menjadi kontra produktif dengan realitas,

¹¹⁹ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, (Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013), H. 251-256

¹²⁰ *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 699.

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² Abdul Hafidh Roisy, *Hadis Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad Dan Matan)*, Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

karena pada umumnya gaji itu dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan.

Secara umum islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Tetapi islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi.¹²³ Menurut M.A. Mannan, kebutuhan pokok yang harus dibayar oleh majikan adalah yang dapat menutup kecukupan hidup dimana standar itu bergantung pada tingkat keadaan sosio ekonomi masyarakat berkaitan. Walaupun islam menganjurkan adanya upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan pokok seseorang, namun islam mengakui adanya perbedaan jumlah upah itu sendiri karena ada dua faktor penentu kadar upah yaitu nilai kerja dan kebutuhan pekerja.¹²⁴ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf 46 : 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahqaf [46] : 19).¹²⁵

¹²³ Martadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi, volume 1, No.2, Desember 2013), h. 253.

¹²⁴ *Ibid*, h.254.

¹²⁵ *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 619.

E. PENELITIAN TERDAHULU

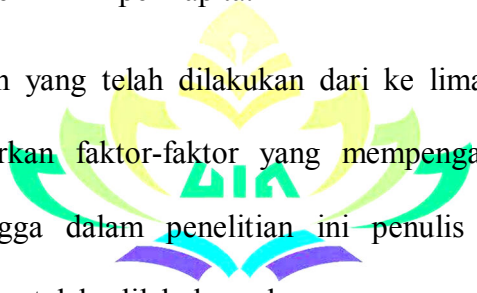
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Tingkat Kemiskinan. ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Habibi, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011)” memperoleh hasil bahwa upah dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.¹²⁶
2. Penelitian ini yang dilakukan oleh Muhammad Nurcholis yaitu “Analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pertumbuhan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014”, memperoleh hasil variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum berpengaruh negative terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif Provinsi Jawa Timur.

¹²⁶Achmad Habibi, *Analisis Fktor-faktor*, h. 2.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wishnu Adhi Saputra, dkk “Analisis Jumlah Penduduk PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota/ Kabupaten Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB dan IPM berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis tanda negative bahwa yang mengidentifikasi bahwa semakin tinggi PDRB dan IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dan pengangguran berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dari penelitian.
4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia terhadap Angka kemiskinan di Indonesia”. Dengan hasil bahwa secara simultan Produk Domestik Bruto (PDB), dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara parsial produk domestik bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan α 20% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan α 5%.
5. Dalam penelitian I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita. Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali”. Dengan hasil

penelitian bahwa pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap jumlah penduduk miskin yaitu variabel PDRB per kapita.



Penelitian yang telah dilakukan dari ke lima peneliti tersebut yang telah memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dimana, dalam penelitian ini akan diambil beberapa variabel yang telah diteliti kemudian menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menggunakan data yang time series terbaru dan setelah itu dilihat bagaimana Ekonomi Islam dalam menjawab masalah antar variabel.

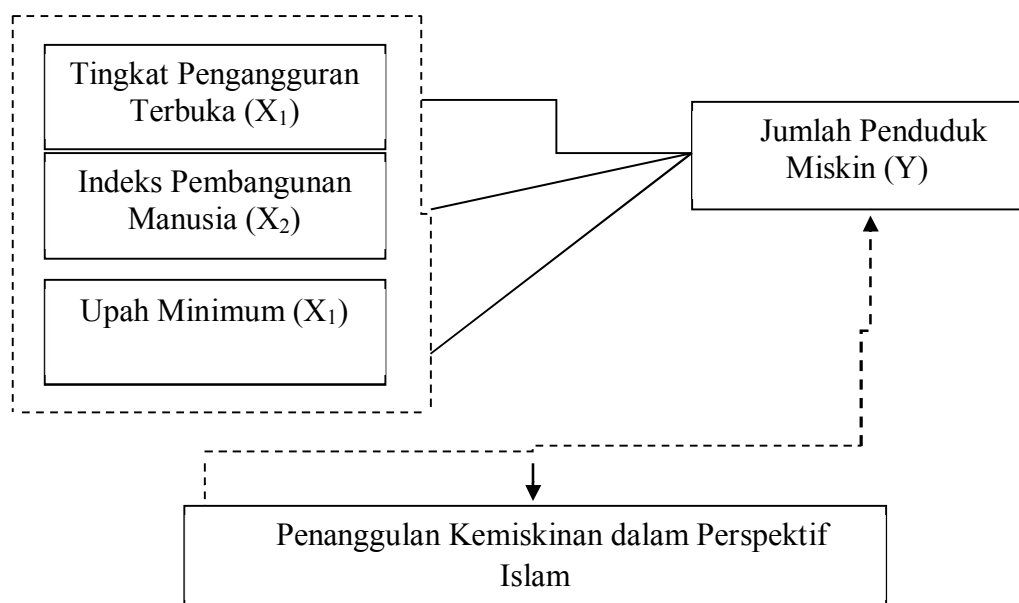
Jadi, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan faktor tingkat pengangguran terbuka, indeks

pembangunan manusia dan upah minimum yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan di analisis berdasarkan perseptif Ekonomi islam.

F. KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan diantaranya yaitu pengangguran, indeks pembangunan manusia dan upah minimum. Memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran kerangka teori dalam pemikiran ini yang akan dikaji dalam perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

Gambar 2.6
Kerangka Pikir



G. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, teori terdahulu dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Sesuai dengan mengacu pada latar belakang masalah, teori-teori, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin

- Berdasarkan teori *Keynesian* yang menyatakan bahwa pekerja semata-mata ditentukan oleh aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu yang *given*. Artinya teori ini banyak melandasi pemikiran tenaga kerja Keynesian. Menurut teori excess suplay dan demand akan tetap ada, karena pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai dengan *Margin Revenue Product Of Labor* (MRPL) atau Produk Pendapatan Margin Dari Tenaga Kerja (tingkat upah).
- Berdasarkan penelitian terdahulu I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, bahwa tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Sesuai dengan mengacu teori-teori, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

Ho : Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kota Bandar Lampung.

Ha : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kota Bandar Lampung.

2. Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penduduk Miskin

- Berdasarkan teori *Human capital* yang menyatakan bahwa “seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan”.
- Berdasarkan penelitian terdahulu Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Sesuai dengan mengacu teori-teori, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah

Ho : Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kota Bandar Lampung.

Ha : Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kota Bandar Lampung

3. Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin

- Berdasarkan teori *mankiw* yang menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang

tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.

- Berdasarkan penelitian terdahulu Achmad Habibi, bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan mengacu teori-teori, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

Ho : Upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kota Bandar Lampung.

Ha : Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Kota Bandar Lampung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan).¹²⁷ Penelitian pustaka mengumpulkan data atau informasi dari buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang berasal dari perpustakaan atau lembaga terkait, dalam hal ini penulis memperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung untuk memperoleh data penelitiannya.¹²⁸

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *kuantitatif*. Penelitian *kuantitatif* yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistic.¹²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *asosiatif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih terhadap satu variabel lainnya. Dengan penelitian ini maka akan

¹²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.

¹²⁸ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 1.

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-15, (Bandung : Alfabeta, 2015). h.14.

dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan meramalkan dan mengontrol suatu gejala.¹³⁰

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang digali secara tidak langsung melalui hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.¹³¹ Data kuantitatif yang dimaksud pada penelitian ini adalah data yang berbentuk laporan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik .

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.¹³² Atau dalam sumber lain disebutkan bahwa data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan tersebut adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun pihak dan sumber-sumber lainnya.¹³³

¹³⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.7.

¹³¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.118.

¹³² Syofian Siregar, *Metode Penelitian ...*, h.16.

¹³³ Buana Suharto dan Ari, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 2004), h. 99.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, Buku, Jurnal penelitian, dan situs internet terkait serta laporan resmi tentang variabel terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan sepenuhnya diunduh dari website resmi badan pusat statistik provinsi Lampung berupa publikasi tahunan dan laporan tahunan pada tahun dan variabel terkait, yakni meliputi :

- a. Data tingkat pengangguran terbuka menurut Kota/Kabupaten Provinsi Lampung tahun 2011–2017.
- b. Data indeks pembangunan manusia menurut Kota/Kabupaten Provinsi Lampung tahun 2011–2017.
- c. Data upah minimum menurut Kota/Kabupaten Provinsi Lampung tahun 2011–2017.
- d. Data jumlah penduduk miskin Menurut Kota/Kabupaten Provinsi Lampung tahun 2011 – 2017.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel, yakni penggabungan antara deret berkala (*time series*) yaitu data dari tahun 2011 – 2017 dengan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 14 data mewakili kota/kabupaten yang menghasilkan 98 observasi yang merupakan hasil kali dari lima tahun penelitian dengan empat belas kota/kabupaten yang menjadi objek atau sampel penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah

yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.¹³⁴

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹³⁵ Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan laporan tahunan tentang variabel yang terkait.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan sebagai konsep yang memiliki bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya.¹³⁶ Berdasarkan hubungannya dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (*Variabel Independen*) dan variabel terikat (*Variabel Dependen*) yaitu:

1. Variabel Bebas (X) (*Variabel Independen*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau yang menjadi timbulnya variabel terikat.

Variabel ini sering disebut dengan variabel *stimulus*, *predictor*,

¹³⁴ Buana Suhart dan Ari, *Perekayasaan Metodologi* ..., h.117.

¹³⁵ Sugiono. *Metode Penulisan Pendidikan* ..., h. 329.

¹³⁶ Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif* ..., h. 10.

antecedent.¹³⁷ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan Upah Minimum (X3) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2011 - 2017.

2. Variabel Terikat (Y) (*Variabel Dependen*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel *respons* atau *endogen*.¹³⁸ Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2017.

Setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mendefinisikannya secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur.¹³⁹ Pendefinisian variabel ini juga untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah :

1. Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung

¹³⁷ Sugiono, *Metode Penulisan Pendidikan ...*, h.18.

¹³⁸ Syofian Siregar, . *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 10.

¹³⁹ Ravi Dwi Wijayanto, *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. (Skripsi Dipublikasikan Universitas Diponegoro, 2010).

tahun periode (2011-2017), data diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.¹⁴⁰
3. Indeks Pembangunan Manusia adalah proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.¹⁴¹
4. Upah minimum adalah upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diterima setiap pekerja.¹⁴²

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis akan menganalisa data sehingga dapat ditarik kesimpulan diakhir. Alat uji analisis data menggunakan analisis data panel karena data provinsi Lampung dibagi menurut Kota/Kabupaten yaitu sebanyak 14 Kota/Kabupaten, Untuk mendapatkan keabsahan data maka digunakan analisa data panel dan uji hipotesa.

1. Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik analisis panel data dengan menggunakan program Eviews 8. Analisis data panel merupakan analisis data yang berstruktururut waktu (*time series*) sekaligus kerat lintang

¹⁴⁰Bhowi Dewananda, *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 3

¹⁴¹ Mohammad Bhakti Setiawan, dkk *Indeks Pembangunan Manusia ...*, h.18.

¹⁴²Bhowi Dewananda, *Analisis Pengaruh Upah...*, h. 3.

(*cross section*).¹⁴³ Menurut Wanner regresi panel merupakan sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon pada data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtun waktu biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan).¹⁴⁴

Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden 2 (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data (misalnya laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi) dalam suatu periode waktu tertentu. Karena data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* maka tentunya akan mempunyai observasi lebih banyak dibanding data *cross section* atau *time series* saja. Akibatnya, ketika digabungkan menjadi pool data, guna membuat regresi maka hasilnya cenderung akan lebih baik dibanding regresi yang hanya menggunakan data *cross section* atau *time series* saja.¹⁴⁵ Maka jika kedua data tersebut tersedia maka data panel dapat digunakan.

Selain itu keunggulan regresi data panel menurut wibisono, antara lain:¹⁴⁶

¹⁴³ Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. (Jakarta : Gramedia, 2012), h. 148.

¹⁴⁴ Styfanda Pangestika, *Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)*. (Skripsi dipublikasikan, Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 1.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Fajriyatul Machmudah, *Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas terhadap Devident Payout Ratio (DPR)*, (Skripsi dipublikasikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 3.

- a. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
- b. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
- c. Data panel didasarkan diri pada observasi (*cross-section*) yang berulang-ulang (*time-series*), sehingga data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- d. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih *informative*, lebih variatif dan lebih kolineritas antara data semakin berkurang dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi lebih efisien.
- e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks, dan
- f. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis dengan :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots$$

Dimana : N adalah banyaknya data *cross section*

Sedangkan persamaan model dengan *time series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots$$

Dimana : T adalah banyaknya data *time series*

Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section* maka dapat diambil model yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots$$

$$I = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana : N : banyaknya observasi

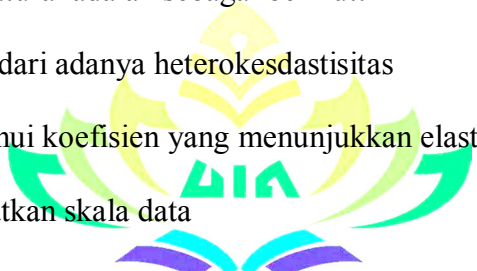
T : banyaknya waktu\

N x T : banyaknya data panel

Secara umum terdapat dua model pendekatan dalam data panel yaitu model tanpa pengaruh (*common effect*) dan model dengan pengaruh (*fixed effect* dan *random effect*). Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) karena jumlah N besar sedangkan jumlah T kecil. Selain itu data *cross section* dalam penelitian ini tidak dapat diambil secara acak oleh karena itu harus menggunakan asumsi *Fixed Effect Model*. Pendekatan efek tetap, model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan *intersepnya*. Dalam model ini, untuk mengestimasi data panelnya menggunakan teknik variabel *dummy* yaitu dengan memasukkan variabel boneka untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun *time series*. Model ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

2. Spesifikasi Model Regresi

Berdasarkan penelitian dan kerangka pemikiran analisis data dibatasi pada empat variabel, yaitu variabel jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum. Sementara itu, adanya perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan yang menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Menurut Imam Gozali yang dikutip Okta Ryan Pranata Yudha alasan untuk pemilihan model logaritma natural adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

- 
- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
 - b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
 - c. Mendekatkan skala data

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (*semi-log*). Dimana *semi-log* mempunyai beberapa keuntungan diantaranya koefisien-koefisien model *semi-log* mempunyai interpretasi yang sederhana, model semilog sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas dan model *semi-log* mudah dihitung.¹⁴⁸ Secara ekonometrika hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum

¹⁴⁷ Okta Ryan Pranata Yudha, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*, (Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang 2013), h. 41.

¹⁴⁸ Wisnu Adhi Saputra yang berjudul “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*”, (Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang 2011), h. 70.

terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2011-2017. Sementa dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan:

$$\text{JPM} = \alpha_i + \beta_1 \text{TP} + \beta_2 \text{IPM} + \beta_3 \log \text{UM} + u_i$$

Dimana: JPM : Jumlah Penduduk Miskin (Persen)

TP : Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

logUM : Upah Minimum (Rupiah)

α_i : Konstanta

β_1 dan β_2 : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

u : Residual

i : 1,2,3,...,33 (data *cross section* Kabupaten/Kota

Provinsi di Lampung)

t : 1,2, dan 3 (data *time series* 2011-2017)



3. Analisis Uji Data Hipotesa

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji *signifikansi* parameter individual (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/*dependen* secara individu dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).¹⁴⁹ Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut :

¹⁴⁹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h. 98.

- 1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel *independen* mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independent* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent*.¹⁵⁰

Kriteria :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan (R^2) mencerminkan kemampuan variabel *dependen*. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak

¹⁵⁰ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka besar proporsi dan total variasi variabel *dependen* yang dapat dijelaskan oleh variabel *independen*.¹⁵¹



¹⁵¹ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 228.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang No 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan karisidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan, yang ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terituntal sejak tanggal 17 juni 1983.

Pada awal berdirinya tahun 1964, Provinsi Lampung baru terdiri atas 4 kabupaten/kota. Pemekaran wilayah mulai dilakukan sejak tahun 1991 yaitu dengan bertambahnya Kabupaten Lampung Barat. Proses pemekaran wilayah sempat 5 kali dilakukan, terakhir berdasarkan UU No. 22 tahun 2012 tentang dasar hukum pembentukan wilayah administrasi Provinsi Lampung, pemerintahan Provinsi Lampung berkembang menjadi 13 kabupaten dan 2 kotamadya . Saat ini, Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya

terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari lima belas kecamatan.
- b. Kabupaten Tanggamus, Kota Agung sebagai ibukotanya dengan luas wilayah 3.020,64 Km² yang terdiri dari dua puluh kecamatan.
- c. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda dengan luas wilayah 700,32 Km² terdiri dari tujuh belas kecamatan.
- d. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukada dengan luas wilayah 5.325,03 Km² terdiri dari dua puluh empat kecamatan
- e. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari dua puluh delapan kecamatan.
- f. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi dengan luas wilayahnya 2.725,87 Km² terdiri dari dua puluh tiga kecamatan.
- g. Kabupaten Waykanan dengan ibukota Blambangan Umpu, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari empat belas kecamatan.
- h. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala, dengan luas wilayah 3.466,32 Km² terdiri dari lima belas kecamatan.
- i. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan, dengan luas wilayah 2.243,51 Km² terdiri dari sebelas kecamatan.
- j. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, dengan luas wilayah 625,00 Km² terdiri dari sembilan kecamatan.

- k. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari tujuh kecamatan.
- l. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, dengan luas wilayah 1.201,00 Km² terdiri dari delapan kecamatan.
- m. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui, dengan luas wilayah 2.907,23 Km² terdiri dari sebelas kecamatan.
- n. Kota Bandar Lampung, dengan luas wilayah 296 Km² terdiri dari dua puluh kecamatan.
- o. Kota Metro, dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari lima kecamatan.

Berikut gambaran provinsi Lampung secara geografis dan secara topografi, yaitu:



1) Secara geografis

Provinsi Lampung terletak pada 103°40' sampai 105°50' Bujur Timur dan 6°45' sampai 3°45' Lintang Selatan, disebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan Selat Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Daerah Lampung memiliki luas dataran 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh :

- a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
- b. Selat sunda di sebelah selatan
- c. Laut Jawa di sebelah Timur

d. Samudera Indonesia di sebelah Barat

Provinsi Lampung adalah Provinsi yang paling strategis karena Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatera untuk dapat menuju ke provinsi-provinsi lainnya.¹⁵² dimana Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan.

Mempunyai pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti labuhan Maringgai dan ketapang. Disamping itu, Kota Menggala juga dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat pelabuhan Krui.

2) Secara Topografi

Lampung berada di ketinggian antara 0 hingga 900 m diatas permukaan laut. Sebagian besar desa di Lampung berada di wilayah bukan tepi laut yaitu mencapai 2.391 desa. Sejumlah 2.328 desa termasuk dalam wilayah hamparan, sedang sisanya berada di wilayah lereng dan lembah. Daerah Lampung memiliki lima unit topografis yaitu:

a. Daerah Topografis Berbukit sampai Bergunung

¹⁵² Profil Provinsi Lampung (Online) tersedia di: <http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>. Diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019, Jam 07:30.

Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m diatas permukaan laut. Daerah ini meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolan- tonjolannya berada pada gunung Tanggamus, gunung Pesawaran dan gunung Rajabasa. Puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang berada di bagian utara.

b. Daerah Topografis Berombak sampai Bergelombang

Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapat bukit-bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggiannya antara 300m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah tersebut meliputi daerah Kedaton kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kab. Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kab. Tanggamus serta Kalirejo dan Bangunrejo di wilayah Kab. Lampung Tengah.

c. Daerah Dataran Alluvial

Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah timur, yang merupakan bagian hilir dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m dengan kemiringan 0% - 3%.

d. Daerah Dataran Rawa Pasang Surut

Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian $\frac{1}{2}$ m – 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang air laut.

e. Daerah River Basin

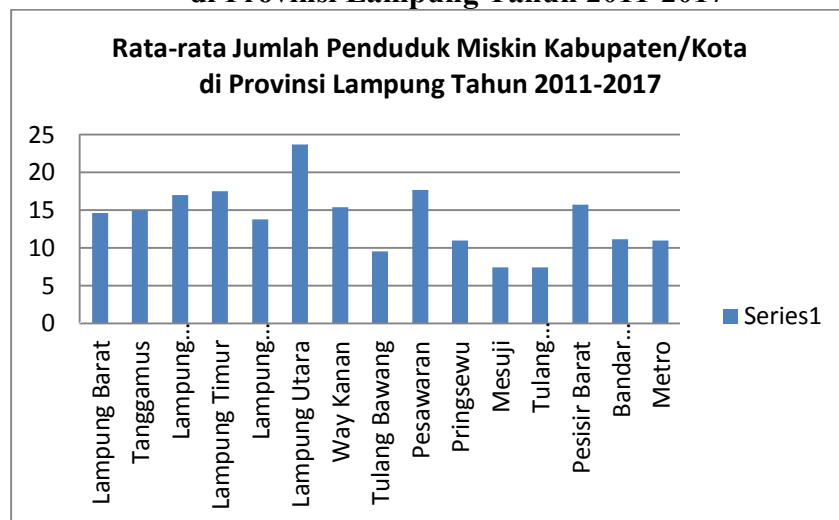
Terdapat lima River Basin yang utama di daerah Lampung yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji.

2. Analisis Deskriptif Objek Penelitian

a. Analisis Deskriptif Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang sering terjadi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Masalah kemiskinan di suatu wilayah ini terus menjadi masalah, termasuk di Provinsi Lampung. Berikut Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung yaitu:

Tabel 4.1
Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2017 (data diolah)

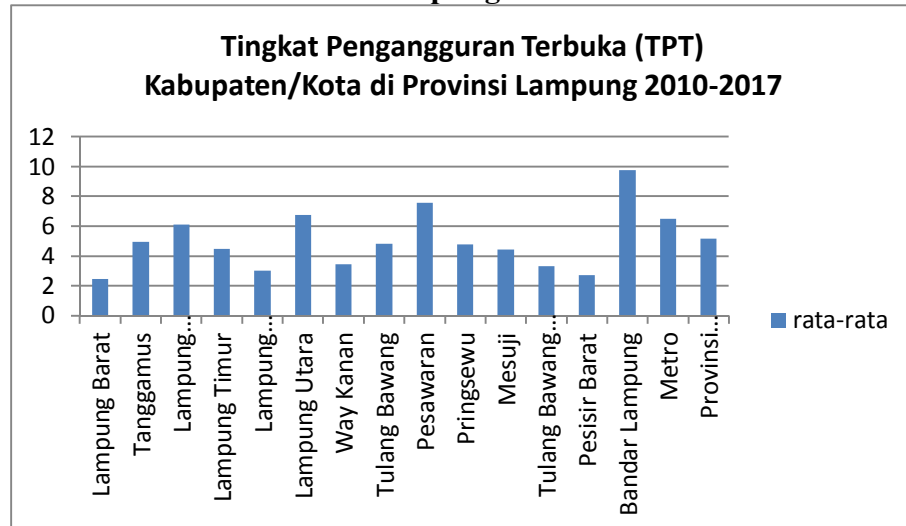
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2017 jumlah penduduk miskin paling banyak terjadi pada tahun 2011 yaitu di Kabupaten Lampung Utara sebesar 27,73 persen. Dan yang paling terendah Kabupaten Mesuji sebesar 7,42 persen. Memiliki angka kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan angka masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

b. Analisis Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator yang sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Berikut disajikan data persentase tingkat pengangguran terbuka menurut kota/kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 dalam satuan persen adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017



Sumber : *BPS Provinsi Lampung Tahun 2017* (data diolah)

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka menurut kota/kabupaten di Lampung yang terbesar adalah di kota Bandar Lampung sebesar 9,76 persen sedangkan tingkat pengangguran terendah sebesar 2,43 persen terjadi di kabupaten Lampung Barat. Hal ini bisa terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan untuk memperbaiki nasib di kota, sehingga banyak masyarakat melakukan transmigrasi dari desa ke kota, sesampainya di kota ia tidak memiliki kemampuan yang cukup sehingga banyak yang menjadi pengangguran yang berada di kota Bandar Lampung.

c. Analisis Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Yang

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan manusia atau meningkatkan kemampuan kerja melalui peningkatan *soft skill*. Dengan adanya pembangunan *soft skill* ini diharapkan kinerja seseorang atau kelompok menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas produktivitas dengan otomatis taraf hidupnya juga akan meningkat. Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang ada dimasyarakat.

Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia menurut kota/kabupaten di provinsi Lampung sejak tahun 2011 – 2015.

Tabel 4.3
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017



Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2017 (data diolah)

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia adalah Kota Metro terbesar sebesar 74,39 persen, sedangkan rata-rata terendah adalah

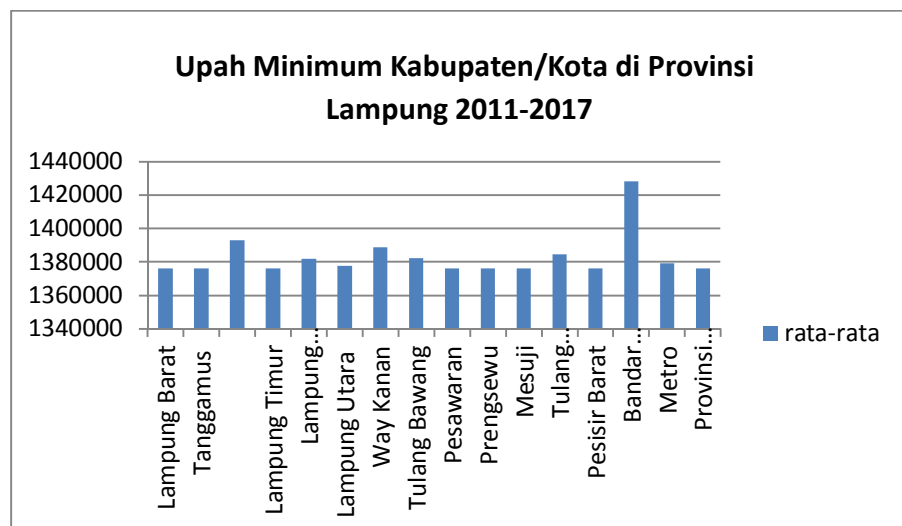
59,17 persen terjadi di kabupaten Mesuji. Hal tersebut bisa terjadi karena pada umumnya kehidupan di perkotaan baik secara pendidikan maupun kesehatan lebih maju jika dibandingkan dengan di pedesaan.

d. Analisis Deskriptif Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Penetapan Upah minimum di Kabupaten/kota Provinsi Lampung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, Dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.4
Upah Minimum Menurut Kota/Kabupaten
di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017




Sumber: PBS Provinsi Lampung 2017 (data diolah)

Penetapan diatas, terlihat bahwa upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selalu mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum ini cenderung seimbang setiap tahunnya. Upah minimum yang ditetapkan tiap kabupaten/kota ini juga cenderung memiliki kesamaan. Perbedaan penetapan upah tiap kabupaten/kota hanya berbeda sedikit. Kenaikan Upah minimum yang ditetapkan pemerintah Provinsi lampung berguna untuk menyelaraskan kebutuhan hidup minimum masyarakat.

B. Analisis Data

1. Analisis Regresi Panel



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017 dengan menggunakan analisis regresi data panel. Untuk memudahkan perhitungan digunakan program *Eviews* 8. Berikut merupakan hasil analisis regresi data panel.

a. Metode *Pooled Least Square (Common Effect)*

Pengujian yang pertama kali dilakukan yaitu dengan menggunakan uji *common effect*. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 4.1
Hasil Regresi Data Panel
Dengan Metode *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT?	2,664843	2,496040	1,067628	0,2884
IPM?	0,863001	1,503537	0,573981	0,5673
UM?	2,153940	15,48613	0,139088	0,8897
R-squared	0,018480			

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode *common effect*:

$$\text{JPM} = 2,664843 \text{ TPT} + 0,863001 \text{ IPM} + 2,153940 \text{ UM}$$

Hasil regresi data panel menggunakan uji *common effect* menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, memperoleh nilai *coefficient* sebesar 2,664843 dan nilai *prob.* sebesar 0,2884 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Indeks pembangunan manusia memperoleh nilai *coefficient* 0,863001 dan nilai *prob.* sebesar 0,5673 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel indek pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Variabel upah minimum memperoleh nilai *coefficient* sebesar 2,153940 dan nilai *prob.* sebesar 0,8897 ($>0,05$) maka dapat

dinyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Nilai koefisien determinasi yang didapat menggunakan uji *common effect* sebesar 0,014480 hal ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara tingkat penganggutan terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar 1% sedangkan sisanya 99% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

b. Metode Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Setelah dilakukan analisis menggunakan model *common effect*, maka langkah berikutnya melakukan analisis regresi data panel menggunakan model *fixed effect*. Berikut ini merupakan hasil regresi data panel menggunakan model *fixed effect*.

Tabel 4.2
Hasil Regresi Data Panel
Dengan Metode *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	272,1116	31,97180	8,510989	0,0000
TPT?	-0,380426	0,408783	-0,930629	0,3548
IPM?	-1,249799	1,894182	-0,659810	0,5112
UM?	-17,10731	21,94248	-0,779644	0,4379
R-squared	0,992675			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode *fixed effect*:

$$\text{JPM} = 272,1116 - 0,380426 \text{ TPT} - 1,249799 \text{ IPM} - 17,10731 \text{ UM}$$

Hasil regresi data panel menggunakan uji *fixed effect* menunjukkan nilai konstanta sebesar 272,1116, nilai ini berarti jika semua variabel independen (tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum) sama dengan nol atau dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar 272,1116 jiwa.

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, memperoleh nilai *coefficient* sebesar - 0,380426 dan nilai *prob.* sebesar 0,3548 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Indeks pembangunan manusia memperoleh nilai *coefficient* - 1,249799 dan nilai *prob.* sebesar 0,5112 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel indek pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Variabel upah minimum memperoleh nilai *coefficient* sebesar -17,10731 dan nilai *prob.* sebesar 0,4379 ($>0,05$) maka dapat

dinyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Nilai *prob* F-statistik sebesar 0,0000 ($<0,05$) yang artinya artinya secara simultan variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Nilai koefisien determinasi yang didapat menggunakan uji *fixed effect* sebesar 0,992675 hal ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap tingkat pendidikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

c. Metode Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Setelah dilakukan analisis menggunakan model *fixed effect*, maka selanjutnya melakukan analisis regresi data panel menggunakan model *random effect*. Berikut ini merupakan hasil regresi data panel menggunakan model *random effect*.

Tabel 4.3
Hasil Regresi Data Panel
Dengan Metode *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	273,2822	36,31459	7,525409	0,0000
TPT?	-0,363709	0,408105	-0,891214	0,3751
IPM?	-0,777714	1,729911	-0,449568	0,6541
UM?	-22,36771	20,16142	-1,109431	0,2701
R-squared	0,333189			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode *random effect*:

$$\text{JPM} = 273,2822 - 0,363709 \text{ TPT} - 0,777714 \text{ IPM} - 22,36771 \text{ UM}$$

Hasil regresi data panel menggunakan uji *rondom effect* menunjukkan nilai konstanta sebesar 273,2822, nilai ini berarti jika semua variabel independen (tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum) sama dengan nol atau dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar 273,2822 jiwa.

Hasil regresi data panel menggunakan uji *random effect* menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, memperoleh nilai *coefficient* sebesar -0,363709 dan nilai *prob.* sebesar 0,3751 (>0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat

pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Indeks pembangunan manusia memperoleh nilai *coefficient* – 0.777714 dan nilai *prob.* sebesar 0,6541 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel indek pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Sedangkan variabel upah minimum memperoleh nilai *coefficient* sebesar sebesar –22,36771 dan nilai *prob.* sebesar 0,2701 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Hasil regresi data panel menggunakan uji *random effect* menunjukkan nilai *prob* F-statistik sebesar 0,000000 ($<0,05$) yang artinya secara simultan variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Nilai koefisien determinasi yang didapat menggunakan uji *random effect* sebesar 0,333189 hal ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat pendidikan sebesar 33% sedangkan sisanya

67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

2. Pemilihan Model Regresi

Setelah dilakukan analisis regresi data panel menggunakan tiga metode yaitu model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi terbaik yang cocok untuk data yang digunakan dengan cara melakukan uji *chow* dan uji *hausman*.

a. Uji *Chow*

Uji *chow* dilakukan untuk melihat model manakah yang lebih tepat, model *common effect* atau *fixed effect model*. Berikut merupakan hasil dari uji *chow*

Tabel 4.4
Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	825,925330	(13,81)	0,0000
Cross-section Chi-square	479,662984	13	0,0000

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Berdasarkan hasil uji *chow* didapatkan nilai *prob cross section F* sebesar 0,0000 dan nilai *chi square* sebesar 0,0000. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *prob.* < 0,05 yang berarti H_0 ditolak, maka H_1 diterima yang artinya model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*.

b. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat metode manakah yang lebih tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Berikut merupakan hasil dari uji hausman:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0,689041	3	0,8758

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Berdasarkan hasil uji hausman didapatkan nilai prob. sebesar 0,8758 hal ini berarti nilai prob. > 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *fixed effect*. Sehingga dalam penelitian ini metode regresi data panel yang digunakan adalah *random effect model*.

3. Pengujian Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain adalah konstan. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017.

Tabel 4.6
Hasil Uji t
(Random Effect Model)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	273,2822	36,31459	7,525409	0,0000
TPT?	-0,363709	0,408105	-0,891214	0,3751
IPM?	-0,777714	1,729911	-0,449568	0,6541
UM?	-22,36771	20,16142	-1,109431	0,2701

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$JPM = 273,2822 - 0.363709 \text{ TPT} - 0,777714 \text{ IPM} - 22,36771 \text{ UM}$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 273,2822, nilai ini berarti jika semua variabel independen (tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum) sama dengan nol atau dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar 273,2822 jiwa.
- 2) Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka, memperoleh nilai *coefficient* sebesar -0,363709 dan nilai *prob.* sebesar 0,3751 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

- 3) Koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia memperoleh nilai *coefficient* -0,777714 dan nilai *prob.* sebesar 0,6541 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- 4) Sedangkan Koefisien regresi variabel upah minimum memperoleh nilai *coefficient* sebesar sebesar -22,36771 dan nilai *prob.* sebesar 0,2701 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

b. Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk melihat secara simultan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut ini merupakan hasil uji f-statistik:

Tabel 4.7
Hasil Uji F
(Random Effect Model)

F-statistic	15,65649
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Hasil uji F menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel *independent* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent*. Berdasarkan hasil regresi pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung tahun 2011-

2017 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5$ persen), dengan *degree of freedom for numerator* (dfn) = 2 ($k-1 = 3-1$) dan *degree of freedom for denominator* (dfd) = 91 ($n-k = 98-7$), maka diperoleh F-tabel sebesar maka diperoleh F-tabel sebesar 3,10.

Hasil regresi pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung tahun 2011-2017 diperoleh F-statistik sebesar 15,65649 dan nilai prob. F-statistik 0,000000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak diantara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 (mendekati angka 1) berarti model tersebut dikatakan baik karena hubungan antara variabel *dependen* dengan variabel *independen* semakin erat. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati angka nol maka variabel *independen* secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variabel *dependen*. Berikut merupakan hasil uji R^2 (koefisien determinasi).

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(Random Effect Model)

R-squared	0,333189
Adjusted R-squared	0,311908

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,333189. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 33% sedangkan sisanya 67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Karena nilai R^2 yang didapat dalam penelitian ini hampir mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan variabel terikat amat terbatas.

4. Interpretasi Koefisien *Random Effect*

Interpretasi koefisien *random effect* digunakan untuk melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berikut hasil uji *Random Effect Model*:

Tabel 4.9
Hasil uji
Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	273,2822	36,31459	7,525409	0,0000
TPT?	-0,363709	0,408105	-0,891214	0,3751
IPM?	-0,777714	1,729911	-0,449568	0,6541
UM?	-22,36771	20,16142	-1,109431	0,2701
Random Effects (Cross)				
_LB--C	-30,99450			
_T--C	-1,089024			
_LS--C	78,66111			
_LTI--C	91,70357			
_LTE--C	85,85718			
_LU--C	59,07567			
_WK--C	-19,36531			
_TB--C	-43,24001			
_PS--C	-11,13428			
_PR--C	-40,58358			
_M--C	-74,31832			
_TBB--C	-67,18385			
_BL--C	31,62549			
_MET--C	-59,01415			

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa:

- a. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Lampung Barat sebesar -30,99450 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 30,99%.

- b. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Tanggamus sebesar $-1,089024$, menyatakan bahwa setiap terjadi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,08%.
- c. Koefisien regresi tingkat tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Lampung Selatan sebesar $78,66111$, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 78,66%.
- d. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Lampung Timur sebesar $91,70357$ menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 91, 70%.
- e. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Lampung Tengah sebesar $85, 85718$, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 85,85%.

f. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Lampung Utara sebesar 59,07567, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 59,07%.

g. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Way Kanan sebesar -19,36531, menyatakan bahwa setiap terjadi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 19,36%.

h. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Tulang Bawang sebesar -43,24001, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 43,24%.

i. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Pesawaran sebesar -11,13428, menyatakan bahwa setiap terjadi tingkat

pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,13%.

j. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Pringsewu sebesar -40,58358, menyatakan bahwa setiap terjadi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 40,58%.

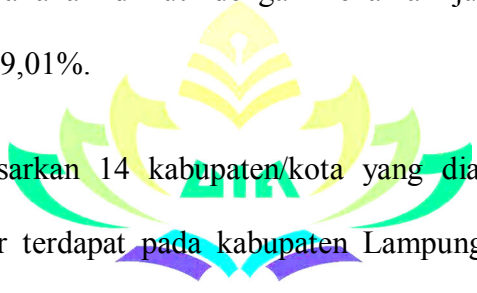
k. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Mesuji sebesar -74,31832, menyatakan bahwa setiap terjadi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 74,31%.

l. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar -67,18385, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 67,18%.

m. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kota Bandar Lampung

sebesar 31,62549, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 31,62%.

- n. Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum yang dihasilkan di kota Metro sebesar - 59,01415, menyatakan bahwa setiap terjadi tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 59,01%.



Berdasarkan 14 kabupaten/kota yang dianalisis, Pengaruh yang paling besar terdapat pada kabupaten Lampung Timur yang memiliki koefisien regresi sebesar 91,70357 yang menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 91,70%. Dan sebaliknya pengaruh yang paling rendah adalah kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki koefisien regresi sebesar -67,18385 yang menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 67,18%.

C. Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian data dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dari uji t didapatkan hasil penelitian bahwa secara parsial variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan sedangkan upah minimum tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.

Pada hasil uji F menyatakan bahwa nilai *prob* F-statistik sebesar 0,000000 ($<0,05$) yang artinya secara simultan variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017.

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,333189. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum sebesar 33% sedangkan sisanya 67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Pengangguran mempunyai dampak yang sangat terasa bagi masyarakat. Apalagi para penganggur tersebut memiliki keluarga dan tanggungan yang harus dipenuhi. Banyaknya pengangguran jika berlangsung lama maka akan berdampak akan semakin memperkeruh

kondisi perekonomian. Dimana keadaan kemiskinan yang diakibatkan oleh pengangguran menimbulkan banyak masalah seperti perilaku kejahatan dan sebagainya. Kondisi lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi dan ditambah minimnya motivasi seseorang untuk melakukan usaha dan membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan melalui usaha sendiri atau disebut dengan wirausaha mengakibatkan pengangguran.

Selain itu faktor yang menimbulkan angka pengangguran terus bertambah karena kondisi ekonomi makro di wilayah khususnya Lampung tidak menentu sehingga para perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya di Lampung sehingga proses perekrutan tenaga kerja tidak maksimal. Jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil uji t
Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT?	-0,363709	0,408105	-0,891214	0,3751

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Nilai koefisien -0,363709 dengan nilai prob. sebesar 0,3751(> 0,05) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis atau teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penelitian, yang dimana hasil penelitian I Made Tony Wirawan dan Arka dengan hasil penelitian

“tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin”.¹⁵³

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Wisnu Adhi Saputra yang berjudul “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*”,¹⁵⁴ Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Desi Yulianti yang berjudul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DIY*”.¹⁵⁵ Dan keduanya memperoleh hasil bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hal ini mengindikasikan bahwa, pengangguran terbuka terdiri dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Hal tersebut juga disebabkan karena setiap tahunnya jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas (pelajar dan mahasiswa) terus meningkat. Namun, mereka masih tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, dikarenakan biaya hidup mereka masih dalam tanggungan orang tuanya.

¹⁵³ I Made Tony Wirawan dan Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan*, h.13.

¹⁵⁴ Wisnu Adhi Saputra yang berjudul “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*”, (Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang 2011).

¹⁵⁵ Desi Yulianti, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DIY Periode Tahun 2007-2013 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*, (Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

Selain itu juga, setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur dapat dikatakan miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena, kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Selain itu terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, hal ini terjadi karena pergeseran musim tanam lebih awal sehingga buruh tani beralih ke industri dan lain-lain, dengan begitu mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵⁶

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

¹⁵⁶ Achmad khabibi, Analisis faktor-faktor yang ... h. 69.

Tabel 4.11
Hasil Uji t
Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM?	-0,777714	1,729911	-0,449568	0,6541

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Koefisien regresi variabel Indeks pembangunan manusia memperoleh nilai *coefficient* -0,777714 dan nilai *prob.* sebesar 0,6541 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis atau teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penelitian, yang dimana hasil penelitian Sri Wahyudi Suliswanto, yang menyatakan “indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Ahmad Syaifullah dan Nazaruddin Malik yang berjudul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean)*”¹⁵⁷ dan Hilda Nureni Lubis yang berjudul “*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Eks-*

¹⁵⁷ Ahmad Syaifullah dan Nazaruddin Malik, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean)*, (Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/2017), h. 107 – 119.

Karesidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015".¹⁵⁸

keduanya memperoleh hasil bahwa, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia disebabkan oleh sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin.¹⁵⁹

Ketidak signifikannya indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin, itu artinya peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang di gambarkan oleh ketiga aspek yakni *pertama*, indeks harapan hidupnya belum menyentuh rakyat miskin secara keseluruhan. *Kedua*, dimana pendidikan hanya di nikmati oleh segelintir orang-orang yang kaya dan belum mampu dirasakan oleh rakyat miskin secara keseluruhan. Serta yang *ketiga*, standart hidup layak di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung masih sangat rendah di kalangan rakyat miskin. Ini terbukti dari hasil analisis di atas

¹⁵⁸Hilda Nureni Lubis, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015*, (Skrpsi dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017).

¹⁵⁹ *Ibid.*,

yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh jumlah upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji t
Upah Minimum

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UM?	-22,36771	20,16142	-1,109431	0,2701

Sumber: *Eviews 8 diolah tahun 2019*

Dilihat hasil *coefficient* sebesar -22,36771 dan nilai *prob.* sebesar 0,2701 ($>0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis atau teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penelitian Achmad Habibi bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.¹⁶⁰

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Dahma Amar Ramdhan dkk. yang berjudul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat*

¹⁶⁰ Achmad Habibi. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi*, h. 71.

*pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda*¹⁶¹ dan Wari Nila Widyawati yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Se-Karesidenan Madiun Tahun 2004-2014*”¹⁶²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, ketidak signifikan pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin dikarenakan orang miskin tidak ditentukan oleh upah minimum Kabupaten/Kota tetapi miskin tidaknya seseorang lebih disebabkan oleh kesempatan orang dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan yang kedua ditentukan oleh style atau gaya hidup serta pola konsumtif orang tersebut.¹⁶³

Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan (*poverty line*). BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah:

f. Tidak miskin. adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610,-

¹⁶¹ Dahma Amar Ramdhan Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Samarinda*, (Journal.Feb.Unmul.Ac.Id Inovasi , Volume 13 (1) 2017).

¹⁶² Wari Nila Widyawati, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Se-Karesidenan Madiun Tahun 2004-2014*, (Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

¹⁶³ *Ibid.*,

- g. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- sampai Rp11.687,- per orang per hari.
- h. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 9.350,- per orang per hari.
- i. Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari.
- j. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya.

Dilihat dari indikator kemiskinan berdasarkan badan pusat statistik dan dibandingkan dengan standart upah minimum yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung sebesar 1.375.926/bulan (upah minimum rata-rata tahun 2011-2017), maka seharusnya tidak dapat dikatakan miskin. Dan pada kenyataannya Provinsi Lampung masih tinggi angka kemiskinannya se-Sumatera. Jadi miskin atau tidaknya seseorang lebih disebabkan oleh gaya hidup dan pola tingkat konsumsifnya seseorang.

Selain itu, sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Lampung adalah sektor pertanian, jasa dan diikuti oleh perdagangan. Dimana sektor pertanian dan jasa adalah sektor informal, sedangkan rata-rata pekerjaan masyarakat Lampung adalah sektor informal dan upah minimum berlaku di sektor formal. Jadi wajar, sebagian besar penduduk Lampung berprofresi di sektor informal, yang notabene tidak bergantung

pada upah minimum. Sehingga upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

4. Penanggulan Kemiskinan Dalam Persepekti Islam di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu berupa papan, sandang dan terutama pangan.

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Menurut imam Al Ghozali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan.¹⁶⁴ Dalam Islam tidak membenarkan sikap berlebihan atau berfoya-foya oleh karena itu Islam sangat mengutamakan kebutuhan yang sangat mendasar dan melarang manusia untuk hidup bermewahan dan berlebihan.

Dalam Islam jenis-jenis gejala atau penyebab kemiskinan. Secara umum ada tiga gejala kemiskinan, yaitu: Kemiskinan Natural, Kemiskinan Kultural dan Kemiskinan Struktural.¹⁶⁵ Dimana Pandangan islam kemiskinan merupakan sesuatu masalah yang sangat kompleks, yang sangat tidak dianjurkannya. Islam melarang kepada umatnya untuk

¹⁶⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam ...*, h. 23.

¹⁶⁵ Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maslahah Volume 13 Nomor 1 April 2017. h. 75

meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa' ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An Nisa’ 4: 9)¹⁶⁶

Adapun program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara lain:¹⁶⁷

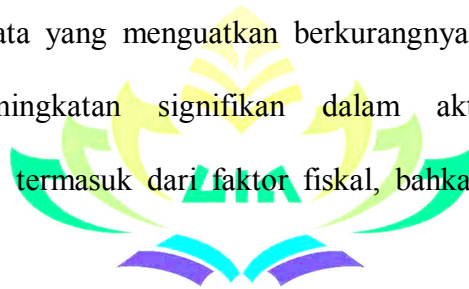
1. *Pertama*, karena pengaruh ekonomi makro dari pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi termasuk penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga, iklim investasi, dan pengembangan infrastruktur.
2. *Kedua*, faktor pendapatan utama yaitu pengaruh langsung dari upaya membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga kurang mampu. Hal itu antara lain terlihat dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, dukungan pengembangan usaha mikro (seperti Kredit Usaha rakyat), pelatihan kerja dan pendampingan usaha sektoral (Kube).

¹⁶⁶ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran (*dibawah naungan Al-Qur'an (Surat Ali-Imran – An-Nisaa 70, jilid 2)*), (Depok: Gema Insani, 2006), h. 287.

¹⁶⁷ Penanganan kemiskinan di Lampung membaik, diunduh pada tanggal 13 juni 2019 <https://sumatra.bisnis.com/read/20180504/533/791790/penanganan-kemiskinan-di-lampung-membaik>

3. *Ketiga*, transfer barang atau bantuan bagi warga kurang mampu, seperti raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, dan sebagainya.

Data kemiskinan menunjukkan sejumlah daerah yang mengalami kondisi membaik tersebut disebabkan faktor kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintahannya. Dan Tim Advokasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan kondisi penanganan kemiskinan di Lampung makin membaik. Hal ini menyusul sejumlah data yang menguatkan berkurangnya kemiskinan. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan, termasuk dari faktor fiskal, bahkan pengaruh pembayaran zakat.¹⁶⁸



¹⁶⁸ Muhammad Arif Tasrif dari TNP2K, Provinsi Lampung, diunduh pada tanggal 13 juni 2019 <https://sumatra.bisnis.com/read/20180504/533/791790/penanganan-kemiskinan-di-lampung-membaik>

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Pengaruh tiga variabel bebas yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung secara parsial dengan hasil diantaranya:
 - a. Variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis, karena tingkat pengangguran terbuka terdiri dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
 - b. Variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung 2011-2017. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis, karena indeks pembangunan manusia disebabkan oleh sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan

proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin.

- c. Sedangkan variabel upah minimum tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung 2011-2017. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis, karena orang miskin tidak ditentukan oleh upah minimum Kabupaten/Kota tetapi miskin tidaknya seseorang lebih disebabkan oleh kesempatan orang dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan yang kedua ditentukan oleh style atau gaya hidup serta pola konsumtif orang tersebut.

2. Pengaruh tiga variabel bebas yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di provinsi Lampung secara simultan menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2017.

3. Penanggulan kemiskinan dalam persepti islam di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah dengan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi termasuk penciptaaan lapangan kerja, stabilisasi harga, iklim investasi, dan pengembangan infrastruktur dan upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui padat karya dengan dukungan pengembangan usaha mikro (seperti Kredit Usahaa rakyat), pelatihan kerja dan pendampingan usaha sektoral (Kube). Dan pemberian transfer barang atau bantuan bagi warga kurang

mampu, seperti raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran terhadap hasil penemuan ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta menerapkan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk mampu menjadi wirausaha mandiri agar mereka dapat mengentaskan kemiskinan keluarganya serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
- b. Pemerintahan harus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dengan program-program sosial dan kesehatannya dan masyarakat harus berupaya memanfaatkan program-program tersebut sehingga angka indeks pembangunan manusia lebih meningkat dan pada akhirnya diharapkan mengurangi jumlah penduduk miskin.
- c. Pemerintah harus hendaknya lebih memperhatikan tingkat upah minimum yang berlaku dan seharusnya upah minimum yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan pokok bagi para pekerja.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepastakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, untuk pemilihan objek, variabel, alat analisis dan periode penelitian sebaiknya berbeda dengan penelitian sebelumnya agar lebih mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfida, BR. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2006).
- Ariefianto, Moch. Doddy. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. (Jakarta : Gramedia, 2012).
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).
- Asri, Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bachrawi, Sanusi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Herlambang, Tedy. dkk. *Ekonomi Makro Teori, Analisis, dan Kebijakan*. (Jakarta: Gramedia, 2001).
- Kuncoro, Mudrajad. *Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*, (Yogyakarta: YKPN, 2000).
- Mankiw, Gregory. *Makroekonomi Edisi Keenam, Macroeconomics 6th Edition*, Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Murni, Asfia. *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2013).
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008).
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002).
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Sugiyono. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-15*, (Bandung : Alfabeta, 2015).
- Suharto, Buana dan Ari, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 2004).
- Subri, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- , *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003).
- , *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
- Syauqi, Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia, 2016).
- Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1) penerjemah M. Abdul Ghoffar dkk., (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).
- Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2),(Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indoneesia, 2009).
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Todaro, P Michael dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Quran (*dibawah naungan Al-Qur'an (Surat Ali-Imran – An-Nisaa 70, jilid 2)*), (Depok: Gema Insani, 2006).

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.*(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Jurnal , Artikel dan Lain-lain

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. *Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 No. 2 Juli - Desember 2017.

Arida, Agustina. *Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh*, Jurnal Agrisep Vol (16) No. 1 , 2015.

Cassandra. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (Periode Tahun 2008-2013)*, Skripsi dipublikasikan Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2016.

Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro:Bandung.

Dewananda, Bhowi. *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013)

Habibi, Achmad. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011)*, (fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Semarang, 2013), h. 7.

Harlik, dkk. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013, ISSN: 2338-4603.

------. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No.2, Oktober 2013.

Hartono, Nono. *Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik*, Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 No. 2 Juli - Desember 2018.

- Lubis, Hilda Nureni. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu, Banyumas, Dan Semarang Tahun 2010-2015*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Machmudah, Fajriyatul. *Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas terhadap Devident Payout Ratio (DPR)*, Skripsi dipublikasikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Marnisah, Luis. *Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Tenaga Kerja Perempuan terhadap terjadinya Diskriminasi Upah pada Sektor Industri Sedang di Kota Palembang*, Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 01, Juni 2017.
- Ningrum, Shinta Setya. *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.
- Pangestika, Styfanda. *Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)*. iSkripsi dipublikasikan, Universitas Negeri Semarang : 2015.
- Rahayu, Desi Ajeng. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pengangguran terdidik di Pulau Sumatera Ditinjau dari Persektif Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Saidy, Emily Nur dan Nurul Hidayah, *Fenomena Kemiskinan Di Kota Makassar Dan Upaya Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Laa Maisyir, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018: 43-59.
- Saputra, Wisnu Adhi. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*, Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang 2011.
- Setiawan, Mohammad Bhakti & Abdul Hakim, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesi*, Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, April 2013.
- Simanjuntak, Payaman J. *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI*

10-12 Desember 1981. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982).

Sisnita, Aisyah. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015)*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah , 2017).

Siti, Humanira An Nisaa', *Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan(Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh)*. Jurnal The Moslem Planners #1, April-Mei : 2013.

Sukmaraga, Prima. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang , Skripsi dipublikasikan tahun 2011.

Sumantri, Rinol. *Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest*, I-Economic Vol.3. No 2. Desember 2017.

Susanti, Sussy. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*, Jurnal Matematika Integratif, ISSN 1412-6184 Vol. 9 No. 1, April 2013.

Yudha, Okta Ryan Pranata, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*, Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang 2013.

Yulianti, Desi *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DIY Periode Tahun 2007-2013 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*, Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Wicaksono, Teguh Yudo. *Tingkat Upah Inflasi Dan Pengangguran Aplikasi Model Lucas-Rapping Terhadap Pasar Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2060-2001*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Vol. III NO. I Juli 2002.

Widyawati, Wari Nila. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Se-Karesidenan Madiun Tahun 2004-2014*, Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

Wijayanto, Ravi Dwi. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi Dipublikasikan Universitas Diponegoro, 2010.

Wirawan, I Made Tony dan Sudarsana Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pdrb Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*, E-Jurnal EP Unud.

Wuri, Retno. *Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya*. Jurnal The Moslem Planners #1, Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. April – Mei 2013.

Blokspot

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> Diunduh pada tanggal 26 Januari 2019, pukul 06:33 WIB.

<http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>. Diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019, Jam 07:30

<https://sumatra.bisnis.com/read/20180504/533/791790/penanganan-kemiskinan-di-lampung-membaik> diunduh pada tanggal 13 juni 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 1

Lampiran 1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung

Menurut Daerah Tahun 2011-2017

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	15.99	15.13	13.96	13.7	14.18	15.06	14.32
Tanggamus	17.06	16.1	15.24	14.95	14.26	14.05	13.25
Lampung Selatan	19.23	18.19	17.09	16.77	16.27	16.16	15.16
Lampung Timur	19.66	18.59	17.38	17.05	16.91	16.98	16.35
Lampung Tengah	15.76	14.96	13.37	13.13	13.3	13.28	12.9
Lampung Utara	26.33	25.16	23.67	23.32	23.2	22.92	21.55
Way Kanan	17.63	16.54	15.36	15.03	14.61	14.58	14.06
Tulang Bawang	10.11	9.43	8.04	8.66	10.25	10.2	10.09
Pesawaran	19.06	18.01	17.86	17.51	17.61	17.31	16.48
Pringsewu	11.62	11.01	9.81	9.83	11.8	11.73	11.3
Mesuji	8.07	7.69	5.81	6.57	8.2	8	7.66
Tulang Bawang Barat	7.11	6.73	6.31	7.12	8.23	8.4	8.11
Pesisir Barat	-	-	-	-	15.81	15.91	15.61
Bandar Lampung	13.61	12.65	10.85	10.6	10.33	10.15	9.94
Metro	12.9	12.09	11.08	10.82	10.29	10.15	9.89
Provinsi Lampung	1230.16	15.65	14.39	14.21	14.35	14.29	13.69

Lampiran 2.

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	2.84	2.28	2.52	2.18	3.55	2.73	0.96
Tanggamus	6.08	3.24	4.88	4.6	5.72	5.15	5.08
Lampung Selatan	8.4	6.1	6.25	6.05	5.38	5.72	4.8
Lampung Timur	4.83	2.77	5.48	5	4.49	4.74	3.89
Lampung Tengah	3.86	2.64	3.33	2.48	2.94	2.71	3.08
Lampung Utara	6.53	8.1	7.4	5.57	7.62	6.55	5.62
Way Kanan	3.49	3.36	4.19	3.35	3.53	3.44	2.88
Tulang Bawang	6.08	5.59	4.38	4.15	5.29	4.7	3.47
Pesawaran	7.33	6.62	9.6	8.54	7.27	7.92	5.73
Pringsewu	7.47	5.98	3.76	3.78	3.85	3.81	4.63
Mesuji	7.96	4.25	9.51	0.81	5.06	2.9	0.65
Tulang Bawang Barat	4.28	1.99	3.61	5.13	2.61	3.83	1.86
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	2.71
Bandar Lampung	12.09	12.32	10.67	8.29	8.51	8.4	8.1
Metro	11.08	11.48	4.36	4.23	5.12	4.68	4.64
Provinsi Lampung	6.38	5.2	5.69	4.79	5.14	4.62	4.33

Lampiran 3.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2011-2017

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	61.92	62.51	63.21	63.54	64.54	65.45	66.06
Tanggamus	60.63	61.14	61.89	62.67	63.66	64.41	64.94
Lampung Selatan	61.95	62.68	63.35	63.75	65.22	66.19	66.95
Lampung Timur	64.1	65.1	66.07	66.42	67.1	67.88	68.05
Lampung Tengah	64.71	65.6	66.57	67.07	67.61	68.33	68.95
Lampung Utara	62.67	62.93	64	64.89	65.2	65.95	66.58
Way Kanan	62.04	62.79	63.92	64.32	65.18	65.74	65.97
Tulang Bawang	63.67	64.11	64.91	65.83	66.08	66.74	67.07
Pesawaran	59.44	59.98	60.94	61.7	62.7	63.47	64.43
Pringsewu	64.86	65.37	66.14	66.58	67.55	68.26	68.61
Mesuji	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72	61.87
Tulang Bawang Barat	60.13	60.77	61.46	62.46	63.01	63.77	64.58
Pesisir Barat	-	-	58.95	59.76	60.55	61.5	62.2
Bandar Lampung	72.04	72.88	73.93	74.34	74.81	75.34	75.98
Metro	72.23	72.86	74.27	74.98	75.1	75.45	75.87
Provinsi Lampung	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25

Lampiran 4.**Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung****Tahun 2011-2017**

Wilayah	Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2011-2017						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Tanggamus	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Lampung Selatan	855000	975000	1150000	1402000	1595000	1800500	1973798
Lampung Timur	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763100	1908556
Lampung Tengah	862500	982000	1154500	1400000	1588000	1770620	1916696
Lampung Utara	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1921670
Way Kanan	866000	983000	1160000	1408000	1590000	1763000	1950000
Tulang Bawang	863000	982000	1155000	1401000	1585500	1771200	1917324
Pesawaran	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Prengsewu	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Mesuji	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Tulang Bawang Barat	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1792100	1939948
Pesisir Barat	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447
Bandar Lampung	855000	981000	1165000	1422500	1649500	1870000	2054365
Metro	855000	975000	1150000	1420000	1582000	1764000	1909530
Provinsi Lampung	855000	975000	1150000	1399037	1581000	1763000	1908447

Lampiran 5.

CAMMON EFFECT

Dependent Variable: JPM?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/08/19 Time: 11:42
Sample: 2011 2017
Included observations: 7
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 98

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TPT?	2.664843	2.496040	1.067628	0.2884
IPM?	0.863001	1.503537	0.573981	0.5673
UM?	2.153940	15.48613	0.139088	0.8897
R-squared	0.018480	Mean dependent var		83.56827
Adjusted R-squared	-0.002183	S.D. dependent var		56.75092
S.E. of regression	56.81284	Akaike info criterion		10.94754
Sum squared resid	306631.4	Schwarz criterion		11.02667
Log likelihood	-533.4292	Hannan-Quinn criter.		10.97954
Durbin-Watson stat	0.015033			

Lampiran 6.

FIXED EFFECT

Dependent Variable: JPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/08/19 Time: 11:44
 Sample: 2011 2017
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 14
 Total pool (balanced) observations: 98

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	272.1116	31.97180	8.510989	0.0000
TPT?	-0.380426	0.408783	-0.930629	0.3548
IPM?	-1.249799	1.894182	-0.659810	0.5112
UM?	-17.10731	21.94248	-0.779644	0.4379
Fixed Effects (Cross)				
_LB—C	-31.82980			
_T—C	-2.385682			
_LS—C	78.16188			
_LTI—C	92.19852			
_LTE—C	86.58512			
_LU—C	58.73517			
_WK—C	-20.00329			
_TB—C	-43.30837			
_PS—C	-12.84741			
_PR—C	-40.03102			
_M—C	-77.38615			
_TBB—C	-68.79145			
_BL—C	35.75909			
_MET—C	-54.85661			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992675	Mean dependent var	83.56827
Adjusted R-squared	0.991228	S.D. dependent var	56.75092
S.E. of regression	5.315103	Akaike info criterion	6.335402
Sum squared resid	2288.276	Schwarz criterion	6.783815
Log likelihood	-293.4347	Hannan-Quinn criter.	6.516776
F-statistic	686.0905	Durbin-Watson stat	0.743383
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7.

RANDOM EFFECT

Dependent Variable: JPM?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/08/19 Time: 11:45
Sample: 2011 2017
Included observations: 7
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 98
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	273.2822	36.31459	7.525409	0.0000
TPT?	-0.363709	0.408105	-0.891214	0.3751
IPM?	-0.777714	1.729911	-0.449568	0.6541
UM?	-22.36771	20.16142	-1.109431	0.2701
Random Effects (Cross)				
_LB—C	-30.99450			
_T—C	-1.089024			
_LS—C	78.66111			
_LTI—C	91.70357			
_LTE—C	85.85718			
_LU—C	59.07567			
_WK—C	-19.36531			
_TB—C	-43.24001			
_PS—C	-11.13428			
_PR—C	-40.58358			
_M—C	-74.31832			
_TBB—C	-67.18385			
_BL—C	31.62549			
_MET—C	-59.01415			
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		65.07461	0.9934	
Idiosyncratic random		5.315103	0.0066	
Weighted Statistics				
R-squared	0.333189	Mean dependent var	2.578610	
Adjusted R-squared	0.311908	S.D. dependent var	6.328243	
S.E. of regression	5.249361	Sum squared resid	2590.245	
F-statistic	15.65649	Durbin-Watson stat	0.662244	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.016568	Mean dependent var	83.56827	
Sum squared resid	317580.7	Durbin-Watson stat	0.005401	

Lampiran 8.

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	825.925330	(13,81)	0.0000
Cross-section Chi-square	479.662984	13	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: JPM?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/08/19 Time: 11:47

Sample: 2011 2017

Included observations: 7

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 98

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	170.8645	305.2627	0.559729	0.5770
TPT?	2.133614	2.678868	0.796461	0.4278
IPM?	1.010915	1.531965	0.659881	0.5109
UM?	-26.89335	54.17269	-0.496437	0.6207

R-squared	0.021741	Mean dependent var	83.56827
Adjusted R-squared	-0.009480	S.D. dependent var	56.75092
S.E. of regression	57.01929	Akaike info criterion	10.96462

Lampiran 9.

UJI HOUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.689041	3	0.8758

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPT?	-0.380426	-0.363709	0.000554	0.4777
IPM?	-1.249799	-0.777714	0.595331	0.5406
UM?	-17.107310	-22.367706	74.989335	0.5435

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: JPM?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/08/19 Time: 11:49

Sample: 2011 2017

Included observations: 7

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 98

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	272.1116	31.97180	8.510989	0.0000
TPT?	-0.380426	0.408783	-0.930629	0.3548
IPM?	-1.249799	1.894182	-0.659810	0.5112
UM?	-17.10731	21.94248	-0.779644	0.4379

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992675	Mean dependent var	83.56827
Adjusted R-squared	0.991228	S.D. dependent var	56.75092
S.E. of regression	5.315103	Akaike info criterion	6.335402
Sum squared resid	2288.276	Schwarz criterion	6.783815
Log likelihood	-293.4347	Hannan-Quinn criter.	6.516776
F-statistic	686.0905	Durbin-Watson stat	0.743383
Prob(F-statistic)	0.000000		

